



● TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 ●

info indonesia

MINGGU | SEPTEMBER 2023

Harga @ Rp 20.000,-



*Road to
Election
2024*



ANIES BAKALAN NANGIS DITINGGAL KOALISI

► PDIP KAMPANYE
TERSELUBUNG
BAWASLU
DIAM SAJA

► PILKADA JAMBI
PETAHANA
POPULARITASNYA
MASIH TINGGI

► LAWAN BERAT
HERMAN DERU, HERI
AMALINDO ATAU
MAWARDI YAHYA

► KPU TUTUPI
CALEG
MANTAN NAPI
KORUPTOR

“Kita mengerti politik itu memang penuh strategi, siasat, taktik, caranya banyak, tapi saya tidak menyangka bahwa tindakan itu sampai sejauh ini. Menurut saya melebihi batas kepatutan moral dalam politik”

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)



Pengkhianat Politik

Dinamika politik Tanah Air semakin memanas menjelang Pilpres 2024. Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan tak henti-hentinya diguncang prahara. Koalisi yang digalang Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memang terlihat tenang dan fokus pada agenda politik mereka.

Namun, kemudian terjadi kejutan yang membuat Partai Demokrat murka. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, diam-diam mewacanakan duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Bak ditinggal pas saying-sayangnya, emosi pengurus dan kader Partai Demokrat tak bisa lagi ditahan. Keputusan yang belum resmi itu dianggap mengkhianati dan menyakiti perasaan kader partai berlambang mercy.

Sensitivitas Partai Demokrat memang terasa cukup tinggi. Rencana mereka untuk menduetkan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terasa ‘sedikit memaksa’ di Koalisi Perubahan. Bukan yang pertama reaksi tersebut muncul saat nama Anies disandingkan dengan yang lain.

Adanya wacana duet Ganjar -Anies juga menimbulkan reaksi yang cukup kuat. Tudingan ada pengkhianat politik pun disampaikan kader Partai Demokrat. Bahkan, saat ini reaksi itu merambah hingga ke tingkat daerah.

Reaksi keras muncul setelah rencana menduetkan Anies Baswedan dengan Cak Imin yang juga tengah merasa tidak dianggap lagi di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mengusung Prabowo Subianto.

Cak Imin dan PKB dianggap hilang dengan masuknya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan, Prabowo tanpa berbicara dengan Cak Imin mengganti KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

PKB yang merasa dikhianati pun juga bermanuver dengan membuka wacana untuk mendekat dengan PDIP. Kemudian juga ikut menyapa Partai Nasdem hingga akhirnya timbul wacana Ganjar -Cak Imin atau Anies-Cak Imin.

Peluang Cak Imin menjadi cawapres Prabowo Subianto juga semakin kecil. Masuknya Airlangga Hartarto dan Erick Thohir seakan mengganggu kenyamanan PKB di Koalisi Indonesia Maju.

Semua dinamika yang terjadi tersebut menjadi bahasan Tabloid Info Indonesia di edisi I September 2023.

Kami juga menyoroti soal pengawasan pelaksanaan Pemilu yang dinilai masih lemah. Pada tahapan DCS ini, banyak sekali pelanggaran yang terjadi, namun tidak ada tindakan apapun karena dianggap dalam wilayah abu-abu.

Ada saling lempar regulasi dari penyelenggara Pemilu 2024 tentang siapa yang berhak menangannya. Di sisi lain, mereka juga menyadari kalau pelanggaran itu memang ada, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan alasan regulasi.

Dinamika politik di daerah juga sangat menarik diamati. Salah satunya di Sumatera Selatan yang baru saja mengumumkan nama calon pejabat Gubernur Sumsel untuk menggantikan posisi Herman Deru dan Mawardi Yahya.

Ada tiga nama yang muncul dan semuanya berpeluang kuat untuk menjabat Gubernur Sumsel selama satu tahun ke depan.

Masih ada banyak sajian menarik lainnya yang kami informasikan di Info Indonesia Edisi I September 2023 ini. Selamat membaca!!!

Info Indonesia INOVASI UNTUK NEGERI

Kamis, 3 November 2022

INFO PARPOL
PENENTUAN CAWAPRES TUNGGU ANGGOTA BARU

INFO OTONOMI
JALAN PROGRAM PENURUNAN STUNTING

INFO EKSEKUTIF
KEPALA DAERAH JANGAN BIKIN KECEWA

JOKOWI BERNYALI EVALUASI MENTERI
•Kemungkinan Kecil Berujung Reshuffle

JAKARTA - Menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini disambut pro-kontra. Lebih-lebih, situasi krisis ekonomi tahun depan mengharuskan semua menteri kabinet untuk lebih fokus pada tugas utama di pemerintahan.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak menyangkut hukum yang berlaku. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, dalam sidang dengar pendapat yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, jabatan yang diserahkan kepada menteri sebagai pejabat negara tidak perlu mundur saat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. "Termasuk menteri yang menjabat sebagai menteri negara, jabatan yang diserahkan kepada menteri sebagai pejabat negara tidak perlu mundur saat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, MK memutuskan bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. "Termasuk menteri yang menjabat sebagai menteri negara, jabatan yang diserahkan kepada menteri sebagai pejabat negara tidak perlu mundur saat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, MK memutuskan bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. "Termasuk menteri yang menjabat sebagai menteri negara, jabatan yang diserahkan kepada menteri sebagai pejabat negara tidak perlu mundur saat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden," kata Wiranto.

Info Indonesia INOVASI UNTUK NEGERI

Kamis, 4 Agustus 2022

INFO PARPOL
KOALISI TERUS DIMATANGKAN

INFO OTONOMI
KAWASAN MANUFAKTUR KURANG KEMISKINAN

INFO EKSEKUTIF
LIBATKAN PUBLIK SUSUN RKUHP

MENTERI NGELET NYAPRES MUNDUR DARI SEKARANG

JAKARTA - Tidak bisa ditugasi, makin hari kian kentara siapa saja menteri yang ngebet mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden. Presiden Jokowi sendiri sudah mengancam siapa saja yang tidak fokus bekerja karena konsentrasinya pecah ke urusan pencalonan. Masalahnya, rasa malu dan etika sudah lama raih dari nurani para pejabat.

Menurut Wiranto, MK memutuskan bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. "Termasuk menteri yang menjabat sebagai menteri negara, jabatan yang diserahkan kepada menteri sebagai pejabat negara tidak perlu mundur saat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, MK memutuskan bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. "Termasuk menteri yang menjabat sebagai menteri negara, jabatan yang diserahkan kepada menteri sebagai pejabat negara tidak perlu mundur saat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden," kata Wiranto.

Info Indonesia INOVASI UNTUK NEGERI

Edisi #33 Juli 2023

CAWAPRES PILIHAN RAKYAT

JAKARTA - Indonesia diuntungkan dengan adanya industri digital terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu didukung dengan potensi ekonomi digital yang diprediksi mencapai Rp1.000 triliun.

Menurut Wiranto, MK memutuskan bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. "Termasuk menteri yang menjabat sebagai menteri negara, jabatan yang diserahkan kepada menteri sebagai pejabat negara tidak perlu mundur saat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, MK memutuskan bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. "Termasuk menteri yang menjabat sebagai menteri negara, jabatan yang diserahkan kepada menteri sebagai pejabat negara tidak perlu mundur saat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden," kata Wiranto.

Info Indonesia TABLOID REFERENSI PEMILU 2024

3 CAPRES PILIHAN RAKYAT

HARUMIKAN SUMSEL DI KANCAH NASIONAL

KOLABORASIKAN RITEL MODERN DAN UMUM

MENEMBUS DOMINASI LELAKI POLITISI

SATU-SATUNYA PERAIH SATUALANGKA PEMBANGUNAN

Info Indonesia TABLOID REFERENSI PEMILU 2024

GIBRAN

ALING PAS DAMPING PRABOWO

PERSAINGAN POLITISI VS MANTAN KAPOLDA

HERMAN DERU UTAMAKAN KELUARGA TOLAK INSTRUKSI SURYA PALOH

UNTUK PEMILU PANGILMA BISA TUNDA PENSIUN

JANGAN SALAH PILIH PEMIMPIN YANG BENAR

Info Indonesia INOVASI UNTUK NEGERI

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung PT. DUA SATU PRO

Sertifikat Dewan Pers Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzal Khan

PEMIMPIN REDAKSI: Rusdiyono

WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irmayani

REDAKTUR: Rio Taufiq Adam, Melati Tagore, Irmayani, Rusdiyono, Nina Erlina

REPORTER: Nefri, Indra Hadi, Sadam M, Hardi Aar, Beni Martha Daya, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir

EDITOR & GRAFIS : Al Amin, Achilles

TATA LETAK : Sujatmiko

MEDIA SOSIAL: Haidir Ali

KEUANGAN : Dra Hj Nurkhamida

SEKRETARIS REDAKSI: Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: RM Solehin, Zul Jamba

ADMINISTRASI: Ega Tri Gustina

DISTRIBUSI: Abdul Muchtar

HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.

1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

BANK ACCOUNT: *A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

TELP 021-791 96781 FAX 021-791 96786

PALEMBANG Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30126

TELP : 0711-7442344



“Masyarakat akan memandang Anies bukan simbol perubahan, tapi sebagai sosok petugas partai yang harus membeo kehendak Surya Paloh”

Jamiluddin Ritonga

ANIES BAKALAN NANGIS DITINGGAL KOALISI

Kemungkinan Anies Baswedan ditinggal pergi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) benar-benar terjadi. Partai Demokrat akhirnya memilih undur diri dari barisan sekaligus mencabut dukungan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terhadap sosok bakal calon presiden itu.

Bahkan, pemicu keluarnya partai politik berlambang mercy itu benar-benar datang dari Partai NasDem yang ternyata main mata dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tak disangka-sangka, Partai NasDem yang dinilai sebagian pihak tak bertaji dalam memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024, justru membuat prahara dengan secara tiba-tiba memutuskan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Anies ialah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Sosok yang kerap disapa Cak Imin tersebut didaulat menjadi bakal cawapres Anies oleh Partai NasDem secara sepihak, terlebih tidak diketahui oleh Partai Demokrat, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga bernaung dalam KPP.

Kekecewaan Partai Demokrat atas keputusan sepihak yang diambil Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, itu usai bertemu Cak Imin di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Agustus 2023, dan disampaikan kepada Partai Demokrat melalui Sudirman Said sebagai perwakilan Anies Baswedan di Tim 8 keesokan harinya, Rabu, 30 Agustus 2023, dengan datang ke Kantor DPP Partai Demokrat, di Jalan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam sebuah siaran tertulis, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyampaikan kekecewaan pihaknya atas kerja sama politik yang dibangun selama kurang lebih setahun ke belakang bersama menjadi sia-sia. Fatalnya karena

Surya Paloh yang justru memilih berkongsi dengan Cak Imin ketimbang dengan Demokrat dan PKS.

“Kami melakukan konfirmasi berita tersebut (Partai NasDem sepihak memutuskan Cak Imin bakal cawapres) kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu (fait accompli),” tulis Riefky dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Info Indonesia.

Riefky mengungkapkan, keputusan Surya Paloh yang ternyata juga diamini oleh Anies Baswedan bertolak belakang dengan rencana yang telah disusun bersama-sama beberapa bulan ke belakang. Dimana, pada intinya pada awal September 2023, Anies akan dideklarasikan bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan ikut berlaga di Pilpres 2024.

“Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, ‘Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY,’” urai Riefky menceritakan latar belakang Paslon Anies-AHY yang

akan dideklarasikan sebagai paslon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

“Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh; Presiden PKS Ahmad Syaikh; dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya,” sambungnya.

Akan tetapi, benar saja keputusan Anies tidak serta merta diumumkan ke publik lantaran Partai NasDem melakukan strategi tarik ulur mencegah AHY menjadi cawapres yang mendampingi di Pilpres 2024. Padahal, Riefky merekam persis pernyataan Surya Paloh yang menyerahkan persoalan pasangan Anies diserahkan kepadanya, dan persoalan deklarasi diserahkan ke Tim 8.

Justru, kenyataannya berkata lain. Partai NasDem membuat Partai Demokrat kecewa besar, karena AHY tak jadi dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Hal ini pun yang membuat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus ayahanda AHY, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung menyelesaikan persoalan ini.

Dalam Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar di Puri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam, 1 September 2023, SBY menilai penyelewengan NasDem terkait kesepakatan tertulis yang dibuat di KPP merupakan prahara yang tak pernah terjadi sepanjang dirinya terjun di dunia politik, tepatnya sejak Partai Demokrat dan dirinya ikut kontestasi Pilpres 2004.

“Kita mengerti politik itu memang penuh strategi, siasat, taktik, caranya banyak, tapi saya tidak menyangka bahwa tindakan itu sampai sejauh ini. Menurut saya melebihi batas kepatutan moral dalam politik,” ujar SBY.

Menurutnya, kejadian membelotnya Partai NasDem dari kesepakatan KPP merupakan prahara. Sehingga dia menduga, apa yang terjadi saat ini sangat mungkin untuk mewujudkan keinginan kelompok penguasa, yakni Pilpres yang digelar pada 14 Februari 2024 hanya diikuti dua pasangan capres dan cawapres.

“Jangan ada dusta di antara kita. Kita juga tahu ada upaya dan

pekerjaan politik agar membuat KPP yang didalamnya ada NasDem, PKS, Demokrat itu tidak bisa berlayar. Dan termasuk yang sensitif, pasangan Anies-AHY yang sudah matang sebetulnya sebelum terjadi prahara ini, pasangan itu tidak boleh terjadi,” tutur SBY.

“Ini pekerjaan politik tingkat tinggi. Ini bukan informasi, ini fakta. Benar ternyata, Anies-AHY yang hampir matang untuk diluncurkan, dan banyak diketahui oleh masyarakat luas, itu terbukti bisa digagalkan,” sambungnya menyesal.

Oleh karena itu, usai gelaran Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng selaku anggota di struktur tertinggi partai itu, menyampaikan keputusan menarik dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres yang diusung sekaligus menarik keterlibatan dalam KPP.

“Setelah rapat dilakukan, Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan, pertama, Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Demokrat tidak lagi berada di KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini,” tegas Andi.

Dari kacamata analisis politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Nasdem dia nilai tak beretika karena menjalin kerja sama politik dengan PKB tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS. Terlebih soal keputusan sepihak NasDem menetapkan Cak Imin sebagai Cawapres Anies Baswedan.

“Surya Paloh telah mempertontonkan politik barbar dengan mengabaikan partai koalisinya. Nasdem juga terkesan memaksa Anies untuk berkhianat dengan Demokrat dan PKS. Hal itu tentunya akan menjatuhkan reputasi Anies yang selama ini dipersepsi masyarakat sebagai sosok yang berintegritas. Anies sebagai sosok yang layak dipercaya juga akan terkikis akibat ulah Surya Paloh,” tuturnya kepada Info Indonesia.

Lebih dari itu, Jamiluddin juga meyakini Anies kemungkinan menangis melihat prahara yang terjadi di KPP terjadi jelang dua bulan pendaftaran capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, peluang dia sebagai pemenang Pilpres akan sulit terjadi mengingat waktu konsolidasi sangat mepet hari H pencoblosan.

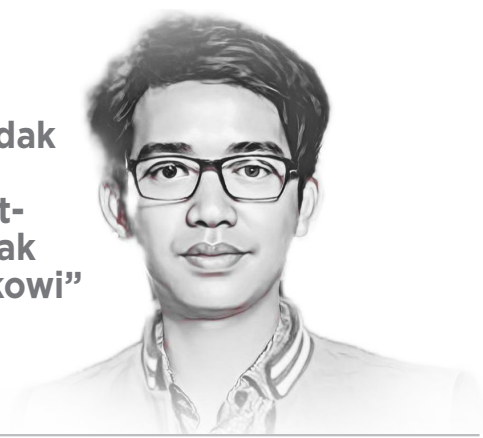
“Jadi, Surya Paloh telah menghancurkan kredibilitas Anies. Masyarakat akan memandang Anies bukan simbol perubahan, tapi sebagai sosok petugas partai yang harus membeo kehendak Surya Paloh. Surya Paloh juga sudah mengubur Anies dengan menduetkannya bersama Cak Imin. Sebab, Cak Imin sosok yang tidak laku dijual,” ungkapnya.

“Hal itu (Cak Imin tak laku dijual) terlihat dari elektabilitas Cak Imin yang sangat rendah. Padahal berbagai kemasan sudah dibuat, namun elektabilitasnya tetap tidak terdongkrak. Ini artinya, elektabilitas Cak Imin memang sudah sulit untuk direkrek,” pungkasnya. ●



“Memang Gerindra tidak mungkin mau kecuali itu menjadi kesepakatan antara Bu Mega, Pak Prabowo dan Pak Jokowi”

Yusak Farchan



DUET GANJAR-PRABOWO TAK DIRESTUI MEGAWATI

Wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai pasangan capres dan cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kembali mengemuka. Hal itu menyusul pernyataan Ganjar yang menyebut kedekatannya dengan Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Ganjar ketika menjadi bintang tamu dalam acara Podkaesang Depan Pintu (PDP) yang tayang di YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat. Ada hal menarik terungkap ketika Kaesang menanyakan ke Ganjar, jika dirinya dipasangkan dengan Prabowo Subianto.

“Sebenarnya oke juga ya (Ganjar presiden- Prabowo cawapres),” ungkap Ganjar dikutip dari video yang tayang Senin, 28 Agustus 2023.

Namun respon berbeda ketika Ganjar ditanya jika dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. “Kita pikir-pikir dulu,” ujar Ganjar.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah memberikan mandat kepada dirinya untuk menjadi calon presiden bukanlah calon wakil presiden.

“Ibu Mega sudah menyampaikan kan waktu itu calon presiden dari PDI Perjuangan Pak Ganjar,” terang Ganjar.

Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan bahwa dirinya dengan Prabowo memiliki hubungan yang sangat dekat. “Kita hormat sama senior, saya dengan beliau dekat,” imbuh Ganjar.

Dia pun mengakui bahwa Prabowo Subianto memiliki kelebihan dari dirinya. Namun, Ganjar sangat menghormatinya. “Saya sangat menghormati, karena Pak Prabowo itu punya kelebihan dibanding saya, itu saya hormati. Beliau kan lebih tua dari saya kan,” ungkap Ganjar.

Pengamat politik Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdus-salam, mengatakan, duet Ganjar-Prabowo sulit terwujud. “Faktanya ego

partai yang sulit dan menghalangi keinginan itu,” kata Surokim, Senin, 28 Agustus 2023.

Dia menilai, Ganjar sepertinya memiliki ketertarikan dengan Prabowo. Kata Surokim, Prabowo memang memiliki citra yang baik. Namun, Prabowo tetap memiliki kekurangan. Dia menyebut, Prabowo Subianto belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

“Sementara masih ada ceruk masa lalu dan swing voters yang masih sulit berpihak ke Pak Prabowo,” jelas Surokim.

Menurutnya, agar diterima oleh seluruh lapisan Masyarakat, Prabowo Subianto harus legowo untuk menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo.

“Sehingga, jalan tengah waktu itu Pak Ganjar-Prabowo. Menurut saya akan menguatkan rekonsiliasi yang sudah dirintis Pak Jokowi,” jelas Surokim.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai, Prabowo Subianto sangat tidak pantas mendampingi Ganjar Pranowo.

Dia menyebut, alasan Ganjar yang mengaku bahwa dirinya sangat menghormati Prabowo Subianto karena lebih senior di dunia perpolitikan maupun pemerintahan hanya sebuah satir.

“Kalau Ganjar hormati Prabowo karena faktor senioritas. Maka, tak pantas kalau Prabowo mau dijadikan sebagai cawapres,” kata Muslim Arbi.

Dia menilai, Ganjar yang menginginkan Prabowo Subianto sebagai

cawapresnya sangat tidak cocok. Seharusnya, kata dia, Ganjar yang menjadi cawapres Prabowo.

“Rasanya kurang pas. Kalau Ganjar mau jadikan Prabowo cawapres. Sama saja mau merendahkan Prabowo dan mau bendung Prabowo untuk jadi presiden,” ucap Muslim Arbi.

Apalagi, Prabowo Subianto telah lebih dulu ditetapkan oleh Gerindra sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Rayuan Ganjar kepada Prabowo nampaknya tidak berhasil. Keinginan Ganjar tersebut, dinilai Muslim Arbi sebagai guyanan.

“Kalau Ganjar mau rayu Pranowo untuk jadikan wakilnya. Alih-alih dianggap ngeledak Prabowo. Mestinya Ganjar cari cawapres yang pas,” terang Muslim Arbi.

Dia menilai, keinginan Ganjar itu sebuah rayuan agar Prabowo mau bergabung dengan PDIP.

Dia berpendapat, Ganjar sangat tidak

pantas menjadi capresnya Prabowo Subianto. Namun sebaliknya, lebih baik Ganjar yang menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, mengatakan, wacana duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto sepertinya akan sulit diterima.

Gerindra dan PDIP pastinya tidak ingin dijadikan sebagai nomor dua. Apalagi, PDIP memiliki target yang cukup besar yakni hat-trick di Pilpres 2024.

“Saya kira itu gagasan yang agak sulit ya, karena positioning Prabowo Subianto menjadi cawapres, saya kira cukup sulit,” kata Yusak.

Dia menilai, Partai Gerindra juga tidak akan mau bergabung dengan koalisi PDIP bersama Partai Hanura, Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi PDIP bisa saja terjadi. Asalkan, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memiliki deal-deal politik di bawah meja.

“Memang Gerindra tidak mungkin mau kecuali itu menjadi kesepakatan antara Bu Mega, Pak Prabowo dan Pak Jokowi,” ungkap Yusak.

Dia mengatakan, wacana duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto sebenarnya sempat mencuat dan kini muncul kembali. Kendati begitu, wacana keduanya tidak pernah terealisasi hingga kini.

“Karena Gerindra dan PDIP memiliki hak politik yang sama mencalonkan kadernya sebagai calon presiden,” jelas Yusak.

Dia mengatakan, wacana duet Ganjar-Prabowo ataupun Prabowo-Ganjar sebelumnya pernah menggema di ruang publik. Namun, opsi kedua pasangan tersebut tidak mendapatkan respon positif dari masing-masing partai.

“Sama-sama menjalani jalan buntu. Ganjar capres, Gerindra tidak mau. Kalau pun dibalik, Prabowo capres, Pak Ganjar cawapres, PDIP tidak akan mau. Kalau pun dibolak-balik formasinya, gagasan itu sulit terwujud,” kata Yusak.

Dia menilai, PDIP dan Partai Gerindra pastinya tidak ingin saling mengalah satu sama lain. Kedua partai itu memiliki target yang besar di Pilpres 2024. Jadi, menurutnya, kedua partai tersebut tidak akan pernah bisa bersatu. “Tidak bisa, skenario itu sulit dijalankan,” ucap Yusak.

Dia menambahkan, pertarungan PDIP dengan Gerindra kini sudah mulai terlihat. Hal itu terlihat ketika PAN dan Golkar resmi bergabung ke Gerindra. Tidak lama kemudian, PDIP menyinggung program food estate.

“Sudah terlihat pertarungan mereka berdua. Di porosnya Pak Prabowo, koalisi Pak Prabowo semakin gemuk dan terkonsolidasi,” pungkas Yusak. ●RDO





“Dari keduanya, Erick Thohir yang lebih memiliki keunggulan untuk bisa meningkatkan pemilih bagi Prabowo dibandingkan Airlangga”

Fernando Emas

Cawapres Prabowo Pilihan Jokowi

AIRLANGGA ATAU ERICK THOHIR

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dipastikan bubar setelah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengumumkan pergantian nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Bubarnya KKIR juga membuat posisi Muhaimin Iskandar kemungkinan besar tak akan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo.

Prabowo mengganti nama koalisi saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Amanat Nasional (PAN) ke-25 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.

Pergantian nama koalisi itu tak berselang lama setelah deklarasi Partai Golkar dan PAN yang masuk ke dalam koalisi dan menyatakan dukungan untuk Prabowo. Sejumlah pihak pun mulai menafsirkan, masuknya Golkar dan PAN ke dalam koalisi mengubah peta konstelasi politik jelang Pilpres 2024.

Keputusan mengganti nama KKIR menjadi KIM juga telah membuat Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB kecewa lantaran tidak diberitahu dan tidak dilibatkan sejak awal. Padahal, PKB merupakan partai pertama yang mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

Buntut keputusan menggantikan nama koalisi itu berdampak hubungan Cak Imin dan Prabowo semakin renggang. Keinginan Cak Imin yang sejak awal telah digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo pun pupus lantaran munculnya konflik di internal.

Kini Cak Imin dikabarkan telah dipinang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan berlabu menjadi Cawapres Anies Baswedan di Pemilu 2024. Dengan berlabuhnya Cak Imin ke Nasdem dan Anies Baswedan, kini KIM pun harus menentukan sosok cawapres pendamping Prabowo.

Di sisi lain, di internal KIM terdapat dua sosok yang digaungkan oleh Golkar dan PAN untuk mendampingi Prabowo Pilpres 2024. Kedua nama itu yakni Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, serta Menteri BUMN, Erick Thohir.

Menyikapi hal itu, Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menilai, Erick Thohir memiliki peluang yang cukup dominan mendampingi Prabowo Subianto jika dibandingkan dengan Airlangga Hartarto.

Hal itu lantaran Erick Thohir dinilai telah memiliki basis masa tradisional yang cukup dominan. Hampir sebagian besar warga Nahdliyin di Jawa Timur yang merupakan barisan loyalis Gus Dur diyakini tak akan memilih Cak Imin buntut konfliknya dengan anak kandung Gus Dur, Yenny Wahid.

“Erick Thohir masih patut

diperhitungkan oleh Prabowo, sebab Erick bisa juga meningkatkan wilayah Jawa Timur untuk menguatkan suara dukungan pemilih Prabowo. Erick didukung representasi NU, tentu saja barisan loyalis Gus Dur akan enggan memilih jika Cak Imin cawapres seperti dinyatakan oleh Yenny Wahid,” kata Efriza saat dihubungi, Jumat, 1 September 2023.

Menurut Efriza, posisi Erick Thohir punya peluang lebih besar mendampingi Prabowo dibandingkan Airlangga Hartarto. Sebab, Ketum Golkar itu dinilai tidak mampu mendongkrak elektabilitas jika mendampingi Prabowo dalam kontesasi Pilpres 2024.

“Airlangga kecil peluangnya bersama Prabowo, karena tidak kompetitif dalam mendongkrak elektabilitas capres jika dipasangkan sebagai cawapres. Artinya, Airlangga opsi buncit saja,” ungkap Efriza.

“Peluang terbesar cawapres Prabowo adalah bersama Erick Thohir ketimbang bersama Airlangga Hartarto. Hanya saja, Erick Thohir juga diminati oleh PDIP, dibuktikan masih dalam lima nama cawapres,” sambung Efriza.

Selain itu, Efriza mengungkapkan, sosok Erick Thohir memiliki peluang besar mendampingi Prabowo Subianto di kontesasi Pilpres 2024 lantaran dinilai memiliki basis massa dukungan yang cukup luas meliputi organisasi masyarakat dan partai politik peserta pemilu 2024.

Efriza menuturkan, selain didukung kelompok Nahdliyin, Erick juga telah didukung PAN yang diketahui merupakan representasi organisasi Islam, yakni Muhammadiyah. Berdasarkan hal itu, Efriza menilai, dua kutub organisasi Islam besar di Indonesia itu dapat menjadi mesin penggerak Erick Thohir melaju ke Pilpres 2024.

“Erick juga didukung oleh GP Anshor. Di sisi lain, Erick juga didukung oleh PAN yang merupakan representasi Muhammadiyah.

Artinya basis dua kekuatan Islam begitu besar di kubu Prabowo meski keluarnya PKB dari KIM,” ungkap Efriza.

Oleh karena itu, Efriza mengatakan, dalam waktu dekat ini Prabowo baiknya membuat kejutan untuk menentukan siapakah sosok cawapres yang bakal menanginya bersaing dalam Pilpres 2024. Jika nantinya Prabowo ingin dipasangkan dengan Partai Golkar, sebaiknya lebih memilih Ridwan Kamil dari pada Airlangga.

“Jika ingin berpasangan dengan Golkar yakni meminta Airlangga memajukan Ridwan Kamil. Ini tentu menjadi opsi menarik. Ridwan Kamil dapat mendongkrak suara dukungan kalangan muda, maupun Jawa Barat, yang memang juga telah menjadi lumbungnya Prabowo,” terang Efriza.

Senada dengan Efriza, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai, sosok Erick Thohir lebih cocok mendampingi Prabowo dari pada Airlangga Hartarto. Sebab, Erick diyakini dapat bersaing dengan Cak Imin yang baru-baru ini dikabarkan dipinang Nasdem menjadi cawapres Anies Baswedan.

Menurut Fernando, hampir seluruh kader partai politik KIM sama-sama memiliki peluang untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto sebagai cawapres pada pilpres 2024.

“Dari keduanya, Erick Thohir yang lebih memiliki keunggulan untuk bisa meningkatkan pemilih bagi Prabowo dibandingkan Airlangga,” ungkap Fernando.

Fernando menilai, dukungan PAN terhadap Erick Thohir diharapkan juga akan mampu menarik pemilih dari anggota Muhammadiyah. Apalagi, Erick lebih luwes dalam membangun hubungan dibandingkan Airlangga.

“Seandainya benar Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan, maka yang sangat memiliki peluang menjadi wakil presiden Prabowo dari kalangan kader partai koalisi tinggal Airlangga Hartarto sebagai Ketua Partai Golkar dan Erick Thohir yang disodorkan oleh PAN,” tutur Fernando.

Fernando menuturkan, dalam rangka menentukan sosok cawapresnya, Prabowo juga akan mempertimbangkan kalkulasi politik soal siapakah sosok yang paling dominan menarik

suara untuknya dalam memenangkan Pilpres 2024.

Fernando menyebut, bergabungnya Golkar dan PAN ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga tidak terlepas cawe-cawe Presiden Jokowi yang menginginkan sosok Airlangga dan Erick Thohir mendampingi Prabowo di Pilpres 2024.

“Prabowo akan melakukan kalkulasi secara cermat siapa yang bisa memperkuat dalam menghadapi pilpres 2024 dan juga siapa yang didorong oleh Joko Widodo,” tutur Fernando

“Saya melihat bergabungnya Partai Golkar dan PAN dengan Partai Gerindra atas arahan Jokowi, maka Prabowo Subianto dalam keputusannya akan sangat memperhatikan arahan dari Jokowi siapa yang menjadi cawapresnya,” sambung Fernando.

Kendati demikian, apabila melihat potensi antara Airlangga dan Erick Thohir, maka keduanya sama-sama patut dipertimbangkan karena memiliki dampak positif bagi Prabowo.

Fernando menjelaskan, sebagai Ketum Partai Golkar, Airlangga memiliki jaringan organisasi yang solid, sehingga sangat bisa dimaksimalkan untuk memenangkan pilpres. Selain itu, sebagai sosok putra Jawa Timur, Airlangga diharapkan juga akan memaksimalkan perolehan suara dari Jawa Timur.

Fernando menambahkan, apabila nanti Prabowo Subianto lebih memilih Erick Thohir menjadi sosok pendampingnya di Pilpres 2024, maka akan lebih diuntungkan lantaran dapat memaksimalkan suara dukungan para pemilih di luar Pulau Jawa, kelompok Islam, kelompok nasionalis, dan masyarakat pecinta sepak bola.

“Erick akan bisa menambah pemilih dari kalangan pecinta sepakbola karena sudah berhasil memperbaiki sepakbola di Indonesia. Erick Thohir juga akan mampu mendatangkan pemilih dari kalangan Nahdliyin karena sudah menjadi bagian dari NU,” pungkasnya. •RDO



“Jangan selalu emak-emak dilihat dengan stigma yang rendah pemahaman politik, karena sudah banyak kaum perempuan yang lebih paham politik dibanding laki-laki”



Maryani Marzuki

JANGAN REMEHKAN SUARA EMAK-EMAK

Ada banyak cara yang dilakukan peserta Pemilu 2024 dalam mendulang suara, mulai dari suara anak muda, organisasi, komunitas hingga ibu rumah tangga. Partai politik kini menyasar kaum emak-emak karena punya banyak massa yang bisa memenangkan pesta demokrasi lima tahunan.

Pengaruh emak-emak diyakini mampu mendominasi suara secara keseluruhan di dalam keluarganya. Namun, ada banyak kriteria yang dilihat oleh emak-emak dalam menentukan pilihannya, mulai dari kandidat yang pembawaan yang religius, wajah rupawan, ramah, bahkan memberikan janji-janji yang menggiurkan.

Potensi besar suara emak-emak ini disadari betul oleh bakal caleg DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah pemilihan 2 Sumatera Selatan, Citra Dewi Izzudin.

Citra mengungkapkan, 50 persen suara di Pemilu adalah sumbangan dari perempuan. Sehingga dari berbagai konstelasi politik apapun, suara perempuan sangat diperhitungkan, bahkan menentukan.

“Bahkan suara perempuan itu dianggap lebih istiqomah dari suara laki-laki. Mereka lebih cenderung melihat sosok daripada fisik, sehingga potensi untuk money politic juga tidak sebesar pemilih laki-laki. Pilihan perempuan juga cenderung siapa sosok yang bisa mensejahterakan kehidupan mereka, karena hal itu dianggap lebih penting,” terangnya.

Wanita yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum bidang Perempuan PPP ini menegaskan, suara perempuan menjadi salah satu fokus utama PPP dalam mendulang suara. Sehingga di Pemilu 2024 ini, PPP banyak menurunkan bakal caleg perempuan dalam upaya mendulang suara. Selain itu, suara perempuan keterwakilan-nya di legislatif belum maksimal.

“Yang mengerti suara perempuan itu ya perempuan itu sendiri. Sehingga PPP cukup peduli dalam mengemban suara dari emak-emak itu. Bahkan, keterwakilan perempuan di partai kami lebih dari 30 persen,” terang alumni Universitas Sriwijaya (Unsri) ini.

Dia mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari suara emak-emak ini. Antara soal kesejahteraan dan peningkatan ekonomi. Keterlibatan UMKM di Indonesia juga lebih dari 50 persen melibatkan kaum perempuan.

Di sisi lain, terjadi kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki, baik di

bidang ekonomi, hukum maupun politik. Kaum emak-emak terkadang masih dinomorduakan, padahal kemampuan mereka terkadang bisa melebihi laki-laki.

“Suara emak-emak ini terkadang hanya diingat setiap lima tahun sekali, setelah itu lupa. Di Pileg saja, sosok perempuan hanya jadi pelengkap syarat 30 persen dengan menempatkan mereka di nomor-nomor sulit atau tersembunyi. Misalnya nomor 1 dan 2 laki-laki, nomor 3 baru perempuan. Kemudian di nomor 6 atau nomor jauh lainnya, sehingga keterwakilan perempuan di legislatif akhirnya sedikit sekali,” ucapnya.

Sebagai caleg perempuan, Citra Dewi mengaku mengerti apa keinginan dari emak-emak ini. Mereka tidak harus diberikan janji-janji muluk dan menggiurkan, cukup mengerti apa yang diinginkan dan menyentuh hatinya, niscaya akan berhasil.

“Butuh sikap lemah lembut dan mengerti perasaan mereka, itu saja. Hadir di kegiatan pengajian, kegiatan sosial dan bertatap muka dengan saling berbagi informasi mengenai apa saja yang mereka butuh sebenarnya itu sudah menyentuh emak-emak. Yang mengerti soal itu ya tentu kami sesama perempuan ini,” ucap Citra Dewi.

Hal yang sama juga dilakukan Ketua DPD Kartini Perindo Palembang, Lely Camelia. Untuk menggaet suara perempuan ini, mereka sering menggelar berbagai kegiatan yang menyasar ke kalangan ibu-ibu dan remaja putri,

seperti senam pagi, kelas make up, kelas memasak pempek Palembang.

Lalu, dia juga bersinergi dengan Sayap Perindo dari DPW RPA Perindo Sumsel dalam mengadakan kegiatan-kegiatan wanita dan kunjungan silaturahmi ke masyarakat pelaku UMKM di berbagai kecamatan di Palembang, serta memberikan program-program pendukung kemajuan UMKM lokal.

“Saat silaturahmi, kami menyosialisasikan tentang Partai Perindo dan program-programnya. Apa saja yang dilakukan sayap Partai Perindo, seperti Kartini Perindo dan RPA Perindo. Kami juga mengajak Masyarakat, terutama kaum perempuan, untuk menjadi kader Perindo dan sayap Kartini Perindo,” katanya.

Jelang Pemilu 2024, mereka mengajak seluruh caleg Partai Perindo di Sumsel untuk bersilaturahmi ke masyarakat dan UMKM. Apalagi UMKM banyak digerakkan oleh kaum perempuan, sehingga Kartini Perindo-lah yang bergerak aktif mendekatkan lagi ke masyarakat.

Menurutnya, program-program kerja dari para caleg yang dipaparkan di depan Masyarakat yang bisa menjadi kesan baik oleh masyarakat, terutama ibu-ibu di lingkungan perkampungan. Karena, program-program yang disampaikan tersebut sangat bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

“Para caleg berkomitmen, punya semangat dan loyalitas yang menjadi modal utama agar bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat di Palembang, terutama di Sumsel,” ujarnya.

Sementara itu, aktivis perempuan di Sumsel, Maryani Marzuki, menuturkan, menjadi hal yang wajar jika seluruh kandidat di Pemilu 2024 mencari simpati ke masyarakat agar terpilih. Dia mengakui, kalangan ibu-ibu memang lebih mudah didekati oleh para caleg, terlebih caleg yang mempunyai program yang mengena di hati masyarakat.

“Kebanyakan emak-emak memang kurang paham dengan dunia politik, jadi lebih mudah dipengaruhi. Yang terjadi selama Pemilu beberapa periode, asal ada calon yang mendekat dan memberikan bantuan, pasti emak-emak akan senang, tanpa berpikir calonnya seperti apa,” ungkapnya.

Dari kacamata mereka, emak-emak juga banyak yang tertarik dengan sosok yang berkharisma, enak dipandang, murah senyum, ramah dan mudah membaur ke masyarakat. Meskipun itu dilakukan hanya untuk pencitraan, namun emak-emak tidak terlalu mempermasalahkannya.

Namun tidak sedikit juga emak-emak yang sudah berpikir panjang dan tidak mudah digoda dengan trik-trik kampanye dari para kandidat. Ada yang tidak suka dengan kandidat yang terlalu menjanjikan program-program yang dirasanya akan sulit terealisasi.

Kandidat yang hanya modal wajah menawan dan sering memberikan bantuan, tidak menjadi modal utama untuk menarik minat sebagian kalangan emak-emak.

“Jadi ada dua karakter emak-emak yang tidak bisa disamaratakan. Yang pasti, suara emak-emak bisa mendominasi di dalam lingkungan keluarga, bisa juga tidak. Jangan selalu emak-emak dilihat dengan stigma yang rendah pemahaman politik, karena sudah banyak kaum perempuan yang lebih paham politik dibanding laki-laki,” ucapnya. ●RDR





“Jadi ada beberapa fraksi termasuk Partai Golkar mengusulkan Robby Kurniawan, bahwa Robby memang sudah kita kenal”

Anita Noeringhati

INFO PILKADA

Minggu I • September 2023

7

HERMAN DERU - MAWARDI YAHYA PAMIT

INILAH 3 SOSOK PJ GUBERNUR SUMSEL

Teka-teki siapa yang akan menjadi Penjabat Gubernur Sumatera Selatan menggantikan Herman Deru yang masa jabatannya akan berakhir pada 1 Oktober 2023 akhirnya terpecahkan.

Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati, mengumumkan, pihaknya bersama dengan sembilan fraksi telah mencapai kesepakatan untuk mengusulkan tiga nama kepada Menteri Dalam Negeri sebagai calon Penjabat Gubernur Sumsel.

Ada lima nama yang diusulkan menjadi Penjabat Gubernur Sumsel. Mereka yakni Sekretaris Daerah Sumsel, SA Supriono; Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Prof Nizar Ali; Staf Ahli Menteri Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Robby Kurniawan; Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi, Kemas Ahmad Tajudin; dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni.

Namun, dari lima nama tersebut, akhirnya terpilih tiga nama yang akan diajukan oleh DPRD Sumsel kepada Mendagri, yakni SA Supriono, Prof Nizar Ali, dan Robby Kurniawan.

Anita menjelaskan, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam pemilihan ini. Salah satu alasan adalah aturan yang mengatur pengusulan Penjabat Jabatan Pimpinan Madya, di mana yang memungkinkan hanya Sekretaris Daerah Sumsel yang memenuhi syarat.

“Sumsel hanya satu yang mempunyai syarat yaitu Sekda Sumsel, kemudian untuk tingkat pusat ada Prof Nizar Ali, jadi ada beberapa fraksi termasuk Partai Golkar mengusulkan Robby Kurniawan, bahwa Robby memang sudah kita kenal,” tegas Anita.

Anita juga mengumumkan, dia akan menyampaikan surat pengusulan tersebut. Surat ini akan disampaikan bersamaan dengan pengumuman resmi pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah ditandatangani olehnya.

“Saya Ketua DPRD diberi kesempatan sampai 8 September, namun karena besok 2 September DPRD ada reses, makanya hari ini saya rapatkan bersama fraksi dan sudah mendapatkan tiga nama yang akan kita usulkan,” ungkap Anita, Jumat, 1 September 2023.

Sementara itu, Robby Kurniawan, mengungkapkan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki hubungan emosional yang erat dengan Sumsel, dirinya siap apabila diamanatkan oleh pemerintah sebagai penjabat gubernur.

Menurutnya, hal ini menjadi suatu kehormatan dan kesempatan yang baik baginya untuk membangun dan memajukan daerah bersama seluruh komponen masyarakat Sumatera Selatan.

“Namun demikian, sebagaimana kita ketahui saat ini semua masih berproses, baik di DPRD maupun Kemendagri,” ungkap Robby.

Untuk itu, menurutnya, biarlah prosesnya mengalir dan proses seleksi terus berjalan. “Insya Allah pada saatnya pemerintah akan menetapkan dan memilih sosok yang terbaik sebagai Penjabat Gubernur Sumsel,” ujarnya.

HDMY Tetap Berpasangan

Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya secara resmi berpamitan kepada seluruh masyarakat Bumi Sriwijaya.

Keduanya berpamitan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel dengan agenda Pengumuman Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Masa Jabatannya Berakhir pada Tahun 2023 di Gedung DPRD Sumsel, Jumat, 1 September 2023.

Herman Deru secara tegas menyatakan dirinya akan tetap berpasangan dengan Mawardi Yahya untuk melanjutkan periode kedua guna untuk mewujudkan Sumsel Maju untuk Semua secara berkeadilan.

Herman Deru mengatakan, selama hampir 5 tahun menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, semua tentu telah berupaya mencapai titik tertinggi dalam mengemban jabatan untuk tujuan yang sama, yakni membawa Sumsel Maju untuk Semua.

“Saya dan Wagub berterima kasih pada segenap pimpinan DPRD dan anggota karena meski berbeda warna, namun dengan tujuan yang sama, bagaimana mempercepat kesejahteraan rakyat yang menjadi tanggung jawab mutlak kita,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi karena pada dua tahun pertama mengabdikan, semua masih tetap kompak menghadapi badai Covid-19 dan mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

“Alhamdulillah kita tetap berjalan menggapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ada ratusan penghargaan yang kita dapatkan sejauh ini, termasuk malam tadi kita terima penghargaan sebagai daerah dengan the best infrastruktur,” jelasnya.

Herman Deru mengatakan, dia dan Mawardi Yahya pamit karena memasuki masa akhir jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 1 Oktober 2023 mendatang. Dalam perjalanannya nanti menuju periode selanjutnya, dia berharap silaturahmi yang ada tidak menjadi pudar.

“Dalam perjalanan nanti mungkin dalam partai, saat pengusulan kita ada yang tidak sama, saya ingin silaturahmi kita ini jangan pudar. Kami pamit singgah dulu di rest area. Ibaratnya kami sampai di KM 5, kami akan harus istirahat dulu untuk berjuang agar dapat meneruskan ke estafet berikutnya. Jika Allah menghendaki amanah ini kepada kami berdua Insya Allah ini tidak akan lama,” jelas Herman Deru.

Selama 4 tahun 11 bulan berinteraksi, Herman Deru mengatakan dirinya menyadari bahwa tidak mung-

kin tidak ada khilaf kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Ia bersama Mawardi Yahya juga memohon maaf dan apresiasi yang tinggi atas capaian di Pemprov Sumsel.

“Begitu banyak capaian yang telah berhasil dilakukan di Sumsel. Tak hanya membangun fisik, namun juga non-fisik secara linear, termasuk mindset bagaimana agar mereka punya rasa memiliki yang tinggi pada daerah Sumsel dan ini diakomodir dengan Perda Tentang Kearifan Lokal,” terangnya.

Sudah banyak prestasi dan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai hingga menjelang periode kepemimpinan HDMY. Apabila dilihat sejak 2018 hingga Agustus 2023, maka Pemprov Sumatera Selatan telah berhasil menerima sebanyak 206 penghargaan, baik di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, ada pula penghargaan bidang administrasi dan umum serta untuk Tim Penggerak PKK. Terakhir, pada 29 Agustus 2023, Sumatera Selatan masuk dalam tiga besar provinsi terbaik Indonesia dalam ajang Nirwasita Tantra atau penghargaan Green Leadership dalam kategori Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selanjutnya, dia juga menyampaikan capaian kinerja berdasarkan delapan tujuan atau prioritas pembangunan pada RPJMD 2029-2023.

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan kemiskinan. Visi Sumsel Maju Untuk Semua pada prinsipnya dilakukan untuk memajukan seluruh wilayah di Sumatera Selatan dan mengurangi kesenjangan wilayah.

Terlihat bahwa di tengah besarnya dampak Covid-19 yang menurunkan angka pertumbuhan ekonomi di hampir semua wilayah Indonesia, maka tren angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan masih tetap terjaga di kisaran 5 persen.

Kedua, Sumatera Selatan berhasil meningkatkan beberapa capaian indikator pembangunan manusia berkualitas, seperti meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,02 pada 2019 menjadi 70,90 pada 2022.

Sejak masa kepemimpinan HDMY, angka IPM Sumsel berhasil berubah kategori dari Sedang menjadi kategori Tinggi dimulai pada 2019 hingga 2022.

Sumatera Selatan telah mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini terbukti dari pencapaian angka pelayanan publik yang stabil di kategori BB selama hampir 5 tahun.

•RDR



“Jika Gerindra memiliki keberanian untuk mencalonkan kadernya sendiri, tentu ini akan menjadi ancaman serius bagi Herman Deru”

Husni Tamrin



LAWAN BERAT HERMAN DERU HERI AMALINDO ATAU MAWARDI YAHYA

Nama Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Heri Amalindo, semakin kuat mendedikasikan diri sebagai calon gubernur Sumatera Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Heri Amalindo bahkan secara nyata menyampaikan program-program yang akan dijalankan jika mampu menggeser petahana, Gubernur Sumsel Herman Deru, yang juga akan kembali maju dalam Pilkada 2024.

“Menjadikan Sumsel mercusuar yang terpenting adalah sinergi dari 17 kabupaten/kota. Namun, jika tidak ada sinergi, maka tidak akan mendapatkan hasil sempurna,” tegas Heri saat menjadi bintang tamu Podcast Info Indonesia di Palembang, Minggu, 27 Agustus 2023.

Tanpa mengecilkan pembangunan lima tahun terakhir, Heri mengaku ikut prihatin dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu,

dia berpendapat bahwa Sumsel membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki visi untuk masa depan.

Heri yakin memiliki kapasitas untuk meneruskan kejayaan Sumsel seperti yang dicapai oleh Gubernur Alex Noerdin. Pada masa itu, Sumsel menjadi pusat olahraga, budaya, pariwisata, perdagangan, dan industri, serta dikenal baik di dalam maupun luar negeri.

Salah satu fokus utamanya adalah mengembalikan program berobat dan sekolah gratis. Sebab, hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 69 persen masyarakat masih menginginkan program ini.

“Dari banyaknya survei yang kita lakukan, nyatanya untuk sekolah dan berobat gratis masih menjadi harapan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, ia berencana untuk mengatur ulang regulasi terkait program berobat dan sekolah gratis, sehingga masyarakat miskin dapat tercakup oleh program BPJS tanpa perlu membayar setiap bulan.

Sedangkan dalam program infrastruktur berkelanjutan, terutama dalam bidang jalan dan jembatan, Heri Amalindo memiliki pengetahuan mendalam tentang infrastruktur ini. Oleh karena itu, program-program yang berfokus pada sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat teratasi dengan pemberian pupuk gratis.

Sementara yang juga menjadi sorotan adalah mangkraknya pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang diwacanakan oleh Herman Deru. Heri Amalindo menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat tidak masuk dalam daftar program strategis nasional. Sehingga, jika dirinya menjadi orang nomor satu Sumsel, maka akan mengembalikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat tersebut dalam program strategis nasional.

“Ya makanya jadi gubernur dulu,”

baru bisa tahu apa yang sedang terjadi dan akan mengembalikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat jadi program strategis nasional,” bebernya.

Nama Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, juga mencuat sebagai calon orang nomor satu di Bumi Sriwijaya, meski dia juga digadang-gadang sebagai pendamping Herman Deru.

Diketahui sudah ada tiga kader berkompetensi dipersiapkan oleh DPD Partai Gerindra Sumsel untuk menjadi calon gubernur dalam Pilgub Sumsel 2024.

Kader Gerindra yang dianggap memiliki potensi sebagai calon gubernur Sumsel adalah Mawardi Yahya, yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Selain itu, mantan Wali Kota Palembang yang juga anggota DPR, Eddy Santana Putra (ESP); serta mantan Bupati Lahat yang kini duduk di DPRD Sumsel, Saifudin Aswari Rivai.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel, Kartika Sandra Desi, menjelaskan, saat ini perhatian utama adalah memenangkan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan meraih sukses dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Partai memiliki kader yang siap untuk maju dalam Pilkada, termasuk Pilgub dan mengakui bahwa berbagai nama seperti Aswari, Mawardi, dan Eddy Santana memiliki

kualitas yang diperlukan untuk memimpin daerah,” jelasnya.

Dalam hal persiapan mengusung calon kepala daerah, Kartika yang akrab disapa Cici ini menegaskan, Partai Gerindra memiliki mekanisme internal dan keputusan akhir ada di tangan DPP Gerindra.

Dia juga menyatakan bahwa pertimbangan dalam memilih calon melibatkan berbagai faktor, termasuk kemampuan partai untuk bersaing secara mandiri. Serta keputusan akhir akan diambil oleh DPP dengan mempertimbangkan masukan dan usulan dari berbagai tingkatan partai.

Pakar Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Husni Tamrin, mengungkapkan, jika Gerindra memiliki keberanian untuk mengusung kader internalnya sebagai calon, hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi Herman Deru.

“Faktor yang menjadi pertimbangan adalah komposisi kursi DPRD Sumsel yang dihasilkan dari Pemilu 2019, di mana Gerindra berada di peringkat atas atau tiga besar,” ulasnya.

Selain itu, Husni mencatat, Gerindra memiliki tokoh-tokoh sentral yang populer, sehingga tidak akan kesulitan untuk mempromosikan kader-kader internalnya dalam Pilgub Sumsel 2024.

“Keputusan akhir partai ini, apakah akan mengusung calonnya sendiri atau tidak, tergantung pada sejauh mana mereka berani mengambil risiko dan menyiapkan strategi yang matang,” jelasnya.

Sebagai partai dengan kendali yang terpusat di tingkat DPP, semua pihak akan menantikan keputusan Gerindra dalam konteks Pilgub Sumsel 2024. Hal ini termasuk juga Gubernur Herman Deru yang menjabat saat ini.

“Jika Gerindra memiliki keberanian untuk mencalonkan kadernya sendiri, tentu ini akan menjadi ancaman serius bagi Herman Deru. Terlebih, tokoh-tokoh seperti Eddy Santana Putra dan Mawardi Yahya, selama ini dikenal sebagai pendukung Herman Deru,” tambahnya. ● IRY





“Sampai saat ini, peta politik di Pilgub Kalbar masih sangat cair. Tapi, saya memprediksi bakal diikuti tiga pasang calon”

Syarif Usmulyadi

GUBERNUR PETAHANA TANTANG CALON LAWAN

Sutarmidji dan Ria Norsan tak lama lagi akan mengakhiri masa jabatan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Sutarmidji sudah menyatakan niatnya untuk kembali bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar 2024. Ini berarti ia siap untuk mengabdikan diri kembali jika terpilih dalam periode kedua sebagai orang nomor satu di Kalbar.

“Saya tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD atau DPR RI. Mengenai Pilgub, kita akan melihat nanti. Namun, hingga saat ini, saya tetap berpikir bahwa saya akan maju karena masih memungkinkan,” ungkap Sutarmidji.

Dirinya mengaku, siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur Kalbar harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang.

“Jadi, siapa pun yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, harus bersiap-siap. Saya juga harus bersiap sejak sekarang,” tegasnya.

Sebagai petahana, Sutarmidji merasa bahwa dirinya tidak perlu melakukan persiapan yang lebih besar untuk menghadapi Pilgub Kalbar 2024. Ia bahkan berpendapat calon-calon baru atau tokoh-tokoh yang berniat berpartisipasi dalam kontestasi politik tersebut harus lebih siap daripada dirinya.

“Para calon baru yang ingin maju harus lebih siap, karena Kalbar berbeda dengan pulau Jawa. Di Jawa, seseorang dapat menyelesaikan per-

jalanannya mengelilingi daerah dalam satu hari,” katanya.

Meskipun akan bersaing dalam Pilgub Kalbar 2024, Sutarmidji tetap terbuka untuk berdiskusi atau berbicara dengan calon-calon lainnya. Baginya, kompetisi bukanlah tentang menciptakan permusuhan, tetapi yang lebih penting adalah untuk mencapai sinergi di antara semua pihak.

“Kita semua adalah orang Kalbar. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menciptakan konflik atau perpecahan, karena negara harus tetap bersatu dan utuh,” jelasnya.

Terkait calon wakil gubernur yang akan mendampingi nanti, Sutarmidji menyatakan Ria Norsan akan tetap menjadi pasangannya.

“Tentang hal ini, kita akan lihat nanti jika ada perubahan. Namun, untuk saat ini, saya ingin tetap berpasangan dengan Pak Wakil (Ria Norsan),” ungkapnya.

Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi, mengeluarkan prediksi terkait Pilgub Kalbar 2024. Ia meramalkan bahwa pemilihan ini akan diikuti oleh tiga pasangan calon. Namun, ia menyatakan situasi politik masih dinamis.

“Sampai saat ini, peta politik di Pilgub Kalbar masih sangat cair. Tapi, saya memprediksi bakal diikuti tiga pasang calon,” kata Syarif Usmulyadi.

Salah satu perubahan yang dianggap mungkin adalah pemisahan pasangan petahana Sutarmidji dan Ria Norsan. Jika ini terjadi dan keduanya bersaing dalam Pilkada, maka potensi tiga pasangan calon dianggap lebih mungkin terjadi.

Namun, masih belum ada kepastian mengenai apakah Sutarmidji dan Ria Norsan akan kembali berduet sebagai pasangan calon.

Syarif Usmulyadi melihat adanya nama-nama yang memiliki potensi maju dalam Pilgub Kalbar. Selain Sutarmidji dan Ria Norsan, ada pula Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, Ketua Komisi V DPR Lasarus, dan Bupati Sambas Satono.

Sutarmidji sebagai petahana memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup, serta capaian pembangunan yang dianggap kuat. Sehingga, ia diyakini akan kembali maju dalam Pilgub Kalbar 2024.

“Partai yang berpotensi mengusungnya termasuk PPP, Golkar, NasDem, dan PKS,” tambahnya.

Ria Norsan juga memiliki potensi sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Ia memiliki popularitas yang kuat dan pengalaman sebagai Bupati Mempawah selama dua periode.

“Norsan juga dikenal dengan citra agamis dan kemampuan logistik yang mumpuni,” ulasnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, juga kini sedang aktif berkeliling Kalbar yang menandakan kesiapannya untuk masuk ke dalam bursa pencalonan calon gubernur. Namun, Syarif melihat bahwa ia mungkin lebih cocok sebagai calon wakil gubernur.

Ada juga Ketua Komisi V DPR Lasarus yang juga telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub Kalbar 2024. “Lasarus memiliki pengalaman politik yang kaya dan partainya, PDIP, merupakan pemenang Pemilu 2019. Ia memiliki peluang besar untuk diusung oleh partai tersebut,” bebernya.

Bupati Sambas, Satono, sebagai pendatang baru di dunia politik juga memiliki potensi karena pengalamannya sebagai birokrat dan pr-

estasinya dalam membangun daerahnya. “Namanya disebut-sebut sebagai calon wakil gubernur yang dapat diterima di berbagai kalangan,” tambahnya.

Lasarus yang juga Ketua DPD PDIP Kalbar mengklaim telah mempersiapkan dua modal kuat untuk bersaing dalam Pilgub Kalbar 2024.

Lasarus menyatakan bahwa jika diberi kesempatan oleh masyarakat untuk menjadi gubernur, dia memberikan jaminan bahwa kepemimpinannya akan lebih baik daripada gubernur petahana.

Modal pertama yang diandalkan Lasarus adalah pengalamannya yang luas sebagai pimpinan DPR selama tiga periode. Modal kedua yang dimiliki Lasarus adalah jaringan hubungan yang luas di pemerintah pusat.

Lasarus menambahkan, pengalaman dan jaringan yang luas ini akan dia manfaatkan sebaik mungkin jika dipercaya untuk memimpin Kalimantan Barat.

“Dalam hal kepala daerah, saya harus mempertimbangkan perkembangan realita politik yang ada. Konsep kepemimpinan saya ke depan agak sedikit berbeda. Saya siap menjadi pemimpin daerah jika itu-

lah yang diinginkan oleh rakyat. Namun, jika rakyat tidak menginginkan-nya, maka saya akan menghormati keputusan tersebut,” ujar Lasarus.

• IRY



“Jadi, niat kami adalah untuk mengusung Bu Khofifah sebagai cagub dengan Mas Emil berada di posisi wakil gubernur. Itulah rencana kami di Jawa Timur”



Herzaky Mahendra Putra

MENANTI KHOFIFAH PILIH JADI CAWAPRES ATAU CAGUB LAGI

Khofifah Indar Parawansa tengah menjadi pusat perhatian karena disebut sebagai kandidat potensial untuk posisi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Selain itu, Khofifah juga memiliki elektabilitas tinggi untuk kembali maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

Ketua Umum Muslimat NU ini bahkan mengumumkan bahwa sejumlah partai politik telah memulai komunikasi tentang kemungkinan dirinya maju sebagai Cawapres.

Walaupun begitu, Khofifah menekankan bahwa keputusannya masih dalam tahap penantian. Dia belum pasti menerima atau menolak tawaran tersebut.

“Kami akan menunda keputusan sampai proses konfirmasi dilakukan bersama. Jadi saat ini belum dalam posisi ‘ya atau tidak,’” kata Khofifah baru-baru ini.

Mantan Menteri Sosial ini menegaskan, sebagai seseorang yang tidak begitu berarti, dia akan mengambil arahan dari tokoh agama yang terkemuka.

Sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Khofifah menjelaskan bahwa langkah-langkah kebijakan selanjutnya akan didiskusikan secara organisasional.

“Setiap langkah kebijakan yang berkaitan dengan organisasi harus

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Ini belum terjadi, sehingga konfirmasi dan klarifikasi diperlukan,” tegasnya.

Khofifah menegaskan bahwa PBNU selalu memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk menyuarakan aspirasi politik mereka. Dia juga menyoroti hubungan komunikasi yang baik antara partainya dengan berbagai partai politik di daerah.

Saat ini, Khofifah telah masuk dalam daftar sepuluh besar calon wakil presiden potensial. Dalam survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research and Consulting, Juli 2023, Khofifah menduduki peringkat ke-9 dengan elektabilitas sebesar 2,3 persen.

Ini menjadikannya lebih tinggi dibandingkan dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti Airlangga Hartarto, Mahfud MD, Yenny Wahid, dan Gibran Rakabuming Raka. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi, dengan margin of error sekitar 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, Partai Demokrat dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur (cagub) dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Selain itu, partai berlambang mercy ini juga mengumumkan niatnya untuk mengajukan Emil Dardak sebagai pasangan Khofifah untuk periode kedua.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengungkapkan, komunikasi antara Khofifah dan Emil tetap berjalan intens.

“Sikap kami adalah mendukung Bu Khofifah,” ungkap Herzaky.

Selaku Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky menjelaskan bahwa Emil Dardak secara rutin memberikan masukan kepada Khofifah. Hasil dari komunikasi ini, menurut Herzaky, menegaskan bahwa Khofifah

dan Emil akan tetap berpasangan dalam periode kedua kepemimpinan.

“Saat ini, Mas Emil memberikan kontribusi berupa masukan, yang memperkuat keyakinan kami bahwa kami akan melanjutkan perjalanan ini bersama-sama,” tegas Herzaky.

Dalam hal pengaturan proporsi, rencananya tidak akan mengalami perubahan. Khofifah akan tetap menjadi Cagub sementara Emil Dardak akan mendampingi sebagai Cawagub Jatim 2024.

“Jadi, niat kami adalah untuk mengusung Bu Khofifah sebagai cagub dengan Mas Emil berada di posisi wakil gubernur. Itulah rencana kami di Jawa Timur,” jelas Herzaky.

Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Siraj, mengamati bahwa persaingan dalam Pilgub Jawa Timur semakin terfokus pada tiga tokoh utama.

Data terbaru dari survei ARCI mengidentifikasi tiga nama yang mendominasi perbincangan, yaitu Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak, dan Achmad Fauzi Wongsojudo.

“Dalam penelitian terbaru kami, nama-nama tersebut mendapat sorotan utama dengan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak berada di peringkat teratas,” ul-

Hasil survei yang dilakukan oleh ARCI d a l a m

rentang waktu 4 hingga 15 Juli 2023 melibatkan 1.250 responden dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Khofifah berada di posisi teratas, diikuti oleh Emil di posisi kedua. Sementara Achmad Fauzi Wongsojudo atau Cak Fauzi semakin mendekati dengan erat kedua nama sebelumnya.

Baihaki menjelaskan bahwa dalam hasil simulasi yang melibatkan 12 nama calon, elektabilitas Cak Fauzi berhasil mencapai 11,2 persen. Meskipun berada di bawah Khofifah dan Emil, namun performa tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan bagi Cak Fauzi.

Dalam simulasi yang lebih terfokus melibatkan hanya empat nama calon, elektabilitas Cak Fauzi terus meningkat. Tokoh muda asal Madura ini berhasil meraih 15,1 persen dukungan. Peningkatan ini menjadikan posisinya semakin mendekati Khofifah dan Emil.

Baihaki menilai peluang kecil jika Khofifah tetap menggandeng Emil. Pasalnya, Baihaki melihat kedekatan antara Khofifah dan Emil kian jauh. Putra Khofifah, Ali Managalli Parawansa, sudah mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Mundurnya Ali menjadi pertanyaan besar hubungan politik antara Khofifah dan Emil.

“Kelihatan kalau di antara gubernur dan wakil gubernur ini ada perpecahan, putranya saja sampai mundur,” ujarnya.

Oleh Karena itu, Khofifah perlu memikirkan opsi lain untuk mencari pendampingnya di Pilgub Jatim 2024.

Menurutnya pilihan yang paling realistis ada di sosok Cak Fauzi. Ia dinilai populer karena dikenal sebagai sosok pemimpin yang kalem dan santun. Sesuai dengan adat ketimuran, sehingga disukai masyarakat di pedesaan.

“Kalau gaya kepemimpinan Cak Fauzi lebih cool,” pungkasnya. ●IRY





“Demokrasi akan lebih bermakna jika diisi oleh individu-individu yang baik, yang benar-benar mewakili keinginan masyarakat dan berkomitmen untuk melayani rakyat”

Masiyan M Syam

PILKADA JAMBI, PETAHANA POPULARITASNYA MASIH TINGGI

Gubernur Jambi petahana, Al Haris, diprediksi tetap diunggulkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan siap meraih kemenangan jika mencalonkan diri untuk periode kedua masa jabatannya.

Meski begitu, Al Haris belum mau buka-bukaan mengenai langkahnya di Pilkada 2024. Dia lebih memilih fokus dulu mengurus masyarakat ketimbang menggambar rencananya maju di periode kedua.

“Saya enggak ada sosialisasi, jangan kita sibuk kampanye-kampanye, biarkan kita fokus dulu urusan rakyat dan urusan yang lain biarkan masyarakat menilainya,” kata Al Haris.

Meski Al Haris merupakan calon petahana yang menjadi primadona di Pilgub Jambi 2024 nanti, namun dia tak mau lebih mengarah urusan Pilkada lantaran fokus tujuannya bekerja.

Al Haris juga tak menapik jika nanti di Pilgub Jambi 2024 akan banyak ke-

mungkinan yang terjadi soal partai pengu-sung. Namun, kini dia tak mau dikaitkan dulu ke urusan Pilgub Jambi.

“Ya apapun itu semua sangat memungkinkan ya, semua sangat memungkinkan tinggal lagi semua proses kita ikuti, itu,” ucap Al Haris.

Pengamat Politik Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Pahrudin, menyatakan, Al Haris adalah tipe pemimpin yang diinginkan masyarakat Jambi untuk melanjutkan masa jabatannya.

“Meski masih ada berbagai dinamika yang bisa mempengaruhi elektabilitas seseorang, namun hingga saat ini saya tetap yakin Al Haris akan memenangkan Pilgub Jambi 2024 untuk periode keduanya,” kata Pahrudin.

Pahrudin menjelaskan, pada Pilgub Jambi 2024, ada tiga nama besar yang berpotensi maju. Selain etahana Al Haris, ada pula Wali Kota Jambi Syarif Fasha, dan Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Hariyanto.

Di antara ketiga calon potensial tersebut, Al Haris menjadi yang terdepan, mengungguli kandidat lainnya.

“Di antara ketiga calon ini, ada satu yang jelas unggul dalam segala aspek, baik dari segi elektabilitas maupun faktor lainnya, yaitu petahana Al Haris, disusul Fasha, lalu Romi,” jelas Pahrudin.

Lebih lanjut ia menyatakan, di antara ketiga calon potensial tersebut, Al Haris merupakan yang paling populer dan memiliki elektabilitas tinggi di kalangan masyarakat Jambi.

“Bagaimana-pun jika

dilihat, di antara ketiga nama tersebut, Al Haris adalah primadonanya, karena beliau adalah yang paling mencerminkan sifat-sifat yang diharapkan dari seorang pemimpin, terutama dalam konteks pemerintahan di Jambi. Kuncinya terletak pada cara beliau mengelola dan mengatur timnya. efektif,” jelas Pahrudin.

Pahrudin juga menyoroti bahwa Al Haris memiliki tingkat elektabilitas dan popularitas yang tinggi dibandingkan calon lawannya. Sedangkan, Romi Hariyanto dengan tegas menyatakan niatnya untuk maju dalam Pilgub Jambi 2024.

Syarif Fasha yang telah menjabat sebagai Wali Kota Jambi selama dua periode, juga memberikan isyarat bahwa ia berencana untuk mencalonkan diri dalam Pilgub Jambi. Meskipun belum secara eksplisit mengumumkan niatnya, baliho-baliho yang menggambarkan Syarif Fasha sudah tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jambi.

Antusiasme terhadap Pilgub Jambi semakin meningkat seiring dengan dirilisnya hasil survei elektabilitas kandidat calon gubernur untuk Pilgub Jambi 2024 oleh Lembaga survei Sigma Idea Indonesia. Dalam hasil survei ini, ketiga nama yang telah disebutkan sebelumnya bersaing dalam hal elektabilitas dan popularitas.

Survei ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Jambi, metode survei ini menggunakan sistem multistage random sampling dengan tingkat keper-

cayaan sebesar 95 persen dan Margin of Error sekitar 2,9 persen.

Sementara itu dari hasil survei dari Sigma Idea Indonesia mengidentifikasi tiga tokoh sebagai potensial calon Gubernur Jambi pada tahun 2024. Ketiga tokoh tersebut adalah Al Haris, Romi Hariyanto dan Syarif Fasha.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Al Haris mendominasi dalam hal elektabilitas dengan persentase sebesar 23,6 persen. Diikuti oleh Romi Hariyanto dengan persentase 15,0 persen, dan Syarif Fasha dengan persentase 13,5 persen.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin (UIN STS) Jambi, Masiyan M Syam, menyatakan, hasil survei ini mencerminkan bahwa Romi Hariyanto mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat.

Ia berpendapat bahwa adanya alternatif kandidat merupakan hal baik. Menurutnya yang penting adalah bagaimana kandidat-kandidat tersebut mampu menawarkan solusi-solusi yang sesuai dengan harapan masyarakat.

“Demokrasi akan lebih bermakna jika diisi oleh individu-individu yang baik, yang benar-benar mewakili keinginan masyarakat dan berkomitmen untuk melayani rakyat,” bebernya.

Pengamat politik dari Universitas Jambi, Dori Effendi, menambahkan, berdasarkan hasil survei, ketiga tokoh tersebut dinilai layak oleh masyarakat untuk menjadi gubernur.

Ia mengungkapkan bahwa Al Haris memiliki kekuatan dari segi pengaruhnya sebagai gubernur saat ini, serta memiliki dukungan kuat di wilayah Jambi Barat. Romi Hariyanto memiliki kekuatan di wilayah Jambi Timur dan sebagai bupati Tanjung Jabung Timur sampai 2024. Sedangkan, Syarif Fasha memiliki dukungan dari Partai NasDem dan basis massa yang luas. •IRY



“Kita bisa lihat ada enggak potensi-potensi pelanggaran administrasi, etik, pelanggaran terhadap UU lainnya. Kalau itu bukan ranah Bawaslu, bisa kita rekomendasikan”

Puadi



PDIP KAMPANYE TERSELUBUNG BAWASLU DIAM SAJA

Video Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming dan Wali Kota Medan Bobby Nasution viral di media sosial karena mengajak masyarakat untuk memilih bakal calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo. Dalam video tersebut, Gibran dan Bobby mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk memilih PDIP dan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

“Saya, Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar. Terima kasih,” ujar Gibran di media sosial X, Senin, 28 Agustus 2023.

Tindakan putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo itu merupakan narasi yang diduga telah menyalahi peraturan larangan kampanye politik karena mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar di Pilpres 2024. Padahal KPU telah menentukan jadwal kampanye caleg dan capres pada 28 November 2023.

Dalam Pasal 69 PKPU 15/2023 tentang Kampanye, partai politik peserta pemilu dan kader-kadernya dilarang melakukan kampanye sebelum resmi ditetapkan oleh KPU pada 28 November 2023. Selain itu, pada Pasal 70 juga disebutkan bahwa sebelum masa kampanye dimulai, partai politik peserta pemilu hanya boleh melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di dalam internal.

Sementara,

kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Parpol itu hanya diperbolehkan dalam bentuk memasang bendera di lingkungan internal. Dalam proses sosialisasi itu, parpol juga diperbolehkan untuk menggelar kegiatan pertemuan secara terbatas. Dengan catatan memberikan informasi terlebih dahulu kepada KPU dan Bawaslu.

Dalam PKPU 15/2023 itu telah disebutkan bahwa tindakan mengajak seseorang untuk memilih kandidat capres ataupun caleg dikategorikan telah melanggar aturan kepemiluan.

Anggota Bawaslu, Puadi, mengaku, pihaknya sejauh ini masih menunggu laporan resmi yang dilayangkan masyarakat soal video yang diduga berisi narasi ajakan memilih Ganjar di Pilpres 2024.

Menurut Puadi, hal itu harus dilakukan lantaran dalam menjalankan tugasnya untuk mendalami dugaan pelanggaran, terdapat dua mekanisme yang harus dijalani oleh Bawaslu.

Pertama, memastikan akan menelusuri temuan pelanggaran pemilu. Kedua, menindaklanjuti laporan ataupun aduan dari masyarakat perihal adanya dugaan pelanggaran pemilu.

“Kita tunggu informasi awal,” kata Puadi di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin, 28 Agustus 2023.

Kendati demikian, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu itu mengungkapkan akan terus konsisten dan tak pandang bulu dalam menindak laporan yang disampaikan masyarakat soal adanya dugaan pelanggaran.

Puadi menegaskan, pihaknya akan melakukan pengawasan atas temuan yang telah disampaikan oleh masyarakat perihal video dari Gibran dan Bobby terkait ajakan memilih Ganjar di Pilpres 2024.

“Ya kita akan lihat dulu. Kita tetap konsisten melakukan pengawasan. Kita bisa lihat ada enggak potensi-potensi pelanggaran administrasi, etik, pelanggaran terhadap UU lainnya. Kalau itu bukan ranah Bawaslu, bisa kita rekomendasikan. Ada satu kewenangan yang bukan merupakan kewenangan Bawaslu,” kata Puadi.

Selain

itu, Puadi menambahkan, saat ini pihaknya terus komitmen melakukan kegiatan pengawasan terkait seluruh tahapan dan sosialisasi partai politik peserta pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pasca penetapan parpol peserta pemilu, kita konsisten hanya mengawasi sosialisasi partai politik,” terang Puadi.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan pihaknya bakal memproses

dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Gibran dan Bobby. Bagja mengungkapkan, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih lanjut perihal dugaan pelanggaran hukum pemilihan Gibran dan Bobby karena saat ini sedang dalam proses penyelidikan.

Kendati demikian, Bagja memastikan dugaan pelanggaran kampanye ajakan memilih Ganjar di Pilpres 2024 itu akan ditindaklanjuti oleh jajarannya, apakah narasi yang disampaikan Gibran dan Bobby melanggar aturan kampanye.

“Kami tidak bisa mengungkapkannya karena masih dalam proses. Jadi kita lagi mengkaji, apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi dalam pasal 283 (UU 7/2017 tentang Pemilu yang berbicara soal kampanye di luar jadwal),” kata Bagja.

Bagja menambahkan, selain Gibran dan Bobby, pihaknya juga bakal menindaklanjuti dugaan pelanggaran kampanye ajakan memilih Ganjar yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah yang juga kader PDIP.

“Makanya sekarang kami imbau kepada teman-teman kepala daerah untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya berhati-hati,” tandas Bagja.

Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, meminta Bawaslu untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Bawaslu harus bekerja secara objektif meski berhadapan dengan partai pemerintah maupun putra dan menantu Presiden Jokowi.

“Bawaslu memang harus berani memeriksa dengan cara

objektif berdasarkan fakta dan peristiwa tersebut. Gibran sudah menyatakan siap diperiksa dan siap dipanggil. Gibran juga mengungkapkan secara tidak tegas bahwa video itu dibuat saat di sekolah partai di DPP PDIP,” kata Efriza, Kamis, 31 Agustus 2023.

Tak lama viral, video itu diduga langsung dihapus oleh akun resmi PDIP di media sosial X. Efriza menduga, video itu sengaja diunggah berdasarkan instruksi langsung dari DPP PDIP guna menaikkan elektabilitas Ganjar di Pilpres 2024.

“Jadi ini menunjukkan bahwa memang proses itu telah dibuat oleh DPP PDIP dan instruksi dari DPP. Jadi diperkirakan sudah banyak rekaman video sejenis yang rencananya akan dipublish bertahap selama masa kampanye,” terang Efriza.

“Jadi diperkirakan ini adalah rangkaian strategi kampanye politik melalui media sosial yang dilakukan oleh PDIP dengan melibatkan para kepala daerah. Mereka ini bekerja sama untuk menerjemahkan arahan ketua umum,” sambungnya.

Efriza menuturkan, Bawaslu harus segera melakukan penelusuran terhadap dugaan kampanye terselubung yang dilakukan PDIP. Selaku pengawas, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang penuh dalam rangka untuk menindak pelanggaran kepemiluan.

“Bawaslu dituntut untuk mempelajarinya secara detail. Jadi tidak sekadar terjebak kepada diksi ini sedang dalam situasi sosialisasi dan belum waktunya kampanye,” ujar Efriza.

Selain itu, Efriza mengatakan, penelusuran soal dugaan kampanye terselubung itu juga harus dilakukan secara rinci dan objektif untuk mencari motif yang sebenarnya perihal narasi ajakan untuk memilih Ganjar di Pilpres 2024.

Hal itu harus dilakukan lantaran Bawaslu juga memiliki tanggung jawab moral kepada publik untuk memberikan keterangan terkait narasi ajakan memilih Ganjar yang dilakukan oleh para kader PDIP.

Di sisi lain, PDIP menampik tuduhan terkait dugaan kampanye di luar jadwal yang telah dilakukan oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Gibran dan Bobby.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai, video soal narasi ajakan memilih Ganjar yang diunggah di akun resmi PDIP dalam media sosial X bukanlah merupakan kampanye lantaran saat ini KPU belum resmi menetapkan jadwal kampanye.

Selain itu, Hasto menegaskan, sejauh ini pihaknya juga tidak memiliki tim kampanye yang resmi lantaran baru akan membentuk setelah KPU telah mengetuk palu untuk menetapkan soal kandidat capres dan cawapres di Pilpres 2024. ●RDO





“Ada kesan yang timbul di tengah masyarakat, bahwa penyelenggara Pemilu sengaja ingin menutupi sekaligus melindungi mantan terpidana korupsi tersebut dari pantauan masyarakat”

Kurnia Ramadhana

INFO
KPU

13

Minggu 1 • September 2023

KPU TUTUPI CALEG MANTAN NAPI KORUPTOR

Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dilakukan dengan keterbatasan yang diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bentuk yang paling nyata terlihat dari ketiadaan profil bakal calon anggota legislatif (caleg) di portal “Info Pemilu”. Alih-alih, yang ditampilkan hanya berupa informasi umum seperti nama, asal partai politik, daerah pemilihan yang diikuti, hingga nomor urut.

Keterbatasan dalam informasi pencalonan tersebut, diproyeksi bakal berimbas langsung kepada masyarakat pemilih, yakni tak mengetahui latar belakang bakal caleg yang akan dipilihnya pada 14 Februari 2024. Kecuali, ada di antara warga negara yang berkesempatan dan peduli menelusuri satu persatu 9.919 nama bakal caleg yang tersebar di 84 dapil.

Bentuk protes kepada KPU akibat keterbatasan akses informasi bakal caleg, pertama kali disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan menyebutkan 15 nama bakal caleg DPR RI dan DPD RI yang berlatar belakang mantan terpidana kasus korupsi. Tidak lama setelah itu, kembali diungkap 24 nama bakal caleg DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang juga pernah dipidana kasus korupsi.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Kurnia Ramadhana, menuturkan, hasil penelusuran pihaknya juga sekaligus mengkritik KPU selaku pemegang kuasa terhadap data-data bakal caleg yang diinput parpol ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Bahkan disebutkan, KPU tak menghormati hak berdaulat warga Indonesia dalam memperoleh informasi.

“Baru-baru ini Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir 15 nama mantan terpidana korupsi yang sedang berupaya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, baik DPR RI maupun DPD RI. Langkah tersebut diambil karena KPU tak kunjung memenuhi hak asasi pemilih dalam hal pemenuhan informasi terkait rekam jejak para kandidat,” ujar Kurnia melalui portal resmi ICW yang dikutip Info Indonesia, Selasa, 29 Agustus 2023.

Tak cuma itu, Kurnia mencurigai tidak disertakannya profil dalam publikasi nama-nama bakal caleg yang masuk DCS ada kesan sengaja yang menguntungkan parpol di satu sisi, dan merugikan masyarakat umum di sisi yang lain.

“Ada kesan yang timbul di tengah masyarakat, bahwa penyelenggara Pemilu sengaja ingin menutupi sekaligus melindungi

mantan terpidana korupsi tersebut dari pantauan masyarakat,” sambungnya.

Di samping itu, informasi belakang layar KPU justru menyebarkan daftar bakal caleg yang masuk kategori mantan terpidana yang dijatuhi hukuman 5 tahun atau lebih. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya tercatat mencapai 52 untuk bakal caleg DPR RI dan 16 bakal caleg DPD RI.

“Giliran gini aja baru mereka lansir,” ke-luh Kurnia.

KPU Buka Data

Ketua KPU, Hasyim Asyari, angkat bicara terkait data lebih dari 50 nama bakal caleg DPR RI dan DPD RI yang merupakan mantan terpidana. Dia tak memungkiri data tersebut masuk ke dalam DCS Pileg 2024 yang diverifikasi KPU hingga pertengahan Agustus 2023.

“Iya, benar data-data tersebut terdapat dalam DCS DPR dan DCS DPD Pemilu 2024,” ujar Hasyim, Minggu, 27 Agustus 2023.

Anggota KPU dua periode itu juga menjelaskan, bakal caleg yang terdaftar sebagai mantan terpidana juga telah memenuhi syarat (MS) dokumen, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta DPD RI.

“Data status sebagai mantan terpidana termonitor dalam Silon,” katanya memaparkan mekanisme verifikasi data persyaratan bakal

caleg yang terpidana.

Hasyim mengurai, dalam Silon disediakan menu isian bagi bakal caleg yang berstatus mantan terpidana melampirkan surat keterangan dari pengadilan, sebagai bukti yang bersangkutan telah selesai menjalani masa hukuman.

“Pada saat mengisi dokumen syarat berupa surat pernyataan bakal calon, Surat Keterangan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan dan dokumen pendukung lainnya (mesti di-input),” urainya.

“Dan syarat tersebut hanya diberlakukan bagi bakal calon yang pernah kena pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, dan dengan ancaman 5 tahun atau lebih,” kata Hasyim.

Kerja KPU dalam tahap pencalonan bakal caleg tersebut turut diperhatikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena terdapat beberapa kerawanan yang kemungkinan dilaporkan ke peradilan Pemilu. Sebab, dalam prosesnya ada keterbatasan informasi.

“Kalau memang nanti juga ada informasi awal, terutama berkaitan tentang hasil pengawasannya, dipandang perlu adanya temuan ya. Kita harus melakukan proses penelusuran, pendalaman, apakah nanti ter-

utama KPU itu sesuai dengan PKPU yang sudah disepakati, dikeluarkan gitu,” kata Anggota Bawaslu, Puadi, di Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu itu mengatakan, dugaan pelanggaran administrasi penyusunan DCS oleh KPU masih dalam proses penelusuran jajaran Bawaslu di seluruh tingkatan. Utamanya, dia memastikan pemetaan banjir sengketa dalam tahapan yang sudah berjalan selama dua bulan terakhir ini.

“Kalau memang nanti ada ya kita langsung dalam. Ini bisa dijadikan temuan. Tapi memang nanti tergantung nih. Ini kan masih dalam proses jajaran kita di Bawaslu RI, provinsi, sampai tingkat kabupaten/kota, juga sedang mengidentifikasi apakah pasca keluarnya DCS ini ada enggak potensi -potensi yang mengarah kepada sengketa,” ucap dia.

Maka dari itu, Puadi memastikan jika nantinya ada potensi sengketa, tentu Bawaslu akan melakukan proses hukum selama 12 hari, yang menurut Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2023 membagi waktu penanganan perkara pada dua tahap. Yakni, disediakan proses mediasi selama 2 hari dan adjudikasi atau persidangan 6 sampai 8 hari.

“Ini lagi pemetaan di beberapa wilayah, terutama di provinsi-provinsi. Yang paling tidak adanya potensi-potensi sengketa ini kita akan lihat udah ada ya, Jawa Barat. Kemudian ada 21 sih sebenarnya provinsi yang adanya potensi sengketa,” terangnya. ●RDO



“Jangan takut untuk sampaikan kepada kami, baik itu melalui media sosial, website KPU, atau datang langsung ke kantor. Setiap laporan yang bisa dipertanggungjawabkan akan kami tindak lanjuti”

Hepriyadi



MANTAN NAPI JANGAN DIPILIH LAGI

Pernah tersandung kasus pidana tak membuat para tokoh di Indonesia hilang berkesempatan untuk kembali ke dunia politik. Meski berlabel mantan narapidana, nyatanya mereka tetap mendapatkan dukungan dari partai politik.

Langkah mantan napi untuk berge-lut di dunia politik kian diper-mulus dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Agustus 2023. MK mengabulkan pengujian UU 7/2017 tentang Pemilu yang berdampak pada pengetatan syarat mantan napi menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Lalu, putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 berisi mantan terpidana bisa mengikuti pemilihan gubernur/bupati/wali kota harus melewati lima tahun usai menjalani pidana penjara.

Sedangkan di putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, mantan terpidana mengikuti pemilihan anggota DPR/DPD melewati lima tahun usia menjalani pidana penjara.

Di Sumatera Selatan, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) memberikan kesempatan bagi dua mantan napi yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, yakni Lucyanti dan Heri Purnomo.

Partai Amanat Nasional (PAN) mengu-sung mantan napi yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Saksi Daerah, Zulmi Oganda. Lalu, ada Suzana J yang didapuk oleh Partai Nasdem.

Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Pimpinan Daerah (Pimda) PKN Sumsel, Albahori, tidak ada pembatasan bagi masyarakat untuk bisa bergabung dan menjadi bakal calon legis-latif (caleg) dari PKN, termasuk dengan mantan napi.

Dia beralasan, sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan diper-bolehkan dan ada keinginan masing-masing pribadi untuk mengabdikan ke masyarakat, masa kelam

caleg tersebut tidak menjadi soal.

“Yang penting bersangkutan punya keinginan kuat berpolitik dan ada UU yang memperbolehkan. Kecuali memang dibatasi untuk mantan napi. Sekarang, kedua bacaleg ini memungkinkan untuk mencalonkan diri. Apalagi adanya peluang untuk berpolitik karena terpanggil untuk memajukan masyarakat. Saya rasa itu sah-sah saja,” katanya.

Dia mencontohkan, Anas Urbaningrum yang menjadi pesakitan di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, selama lebih dari Sembilan tahun. Anas lalu bebas dari penjara pada 11 April 2023.

Anas Urbaningrum terjerat kasus dugaan korupsi di proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang pada 2013. Karena Anas Urbaningrum berjiwa politik, akhirnya dia dipercaya sebagai Ketua PKN tahun ini.

Sosok Anas Urbaningrum membuat mereka terinspirasi untuk melakukan politik yang sehat. Mereka juga optimis PKN bisa mendapatkan simpati dari masyarakat. PKN juga tidak terlalu memusingkan stigma negatif yang menyebut caleg mantan napi bisa menurunkan citra partai.

Dia mengklaim, para caleg sudah dipas-tikan berkompeten, tidak asal mempro-mosikan diri tanpa aksi dan menunjukkan prestasi.

“Biarlah masyarakat yang memilih, karena masyarakat punya persepsi masing-masing. Belum tentu juga yang divonis itu bersalah, ada yang menjadi korban politik, sehingga dituduh bersalah,” ungkapnya.

Mereka sangat perhatian terhadap masyarakat, sehingga banyak yang memutuskan kembali ke dunia politik. Jadi keinginan masyarakat menjadi bahan pertimbangan Lucyanti berkiprah di dunia politik.

Walau berstatus mantan napi, istri dari mantan Bupati Musi Banyuasin, (alm) Fahri Azhari, bahkan didapuk menjadi Ketua Pimda PKN pada 2021.

Mantan anggota DPRD Sumsel ini ingin kembali ke masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan warga Sumsel dengan mencalonkan diri sebagai caleg DPRD

Sumsel Dapil IX yang meliputi Kabupaten Musi Banyuasin.

Jangan Dipilih Lagi

Pengamat hukum dan politik, Ferdian, menyebut jika partai politik yang mengu-sung caleg mantan napi tidak punya kontrol organisasi. Mungkin ada banyak hal yang dilihat dari caleg mantan napi itu, mulai dari kaya raya, punya jabatan tinggi, atau bisa menarik massanya.

“Mantan napi boleh-boleh saja ikut, tapi poin moralnya itu jadi bagian penting untuk menilai, apakah mantan napi itu bisa dipilih atau tidak. Inilah yang sebenarnya, ada semacam double concept. Di satu sisi kita berharap calon-calon legislator adalah orang yang mumpuni dan siap dalam semua aspek. Tapi nyatanya, moralnya saja menjadi salah satu yang tidak bisa dijabarkan secara baik oleh peserta pemilu seperti parpol atau penyelenggara pemilu,” ucapnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) ini juga melihat fenomena ini sebagai hal yang sangat miris. Apalagi, parpol seakan tidak bisa mencari kandidat lain yang lebih baik, alih-alih memilih mantan napi yang terjerat kasus korupsi.

Walau caleg mantan napi itu mengu-sung konsep kembali ke nol, tapi track record-nya yang buruk masih melekat di masyarakat. Jika ingin mengambil yang terbaik, masyarakat seharusnya tidak memilih partai yang mencalonkan mantan napi.

“Kalau mantan napinya tidak masalah, tapi setiap partai ada merekrut mantan napi. Partainya juga jangan dimenangkan. Parpol yang mendukung mantan napi jadi caleg, tidak harus didukung, partai apapun itu, saya tidak menunjuk partai mana,” katanya.

Dia juga menyangsikan jika caleg mantan napi itu dipilih untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

Akademisi Unsri ini menilai, dipilihnya caleg mantan napi hanya untuk kepentingan parpol, bukan untuk masyarakat.

Terlebih jika caleg mantan napi terjerat kasus korupsi, kemungkinan besar berpeluang bisa melakukan tindakan korupsi lagi kalau menjabat.

Masyarakat Bisa Menilai

Koordinator Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sumsel, Hepriyadi, mengatakan, diumum-kannya beberapa nama di daftar calon sementara (DCS) menjadi waktu masyarakat untuk melakukan penilaian. Sementara KPU juga menunggu laporan ada atau tidaknya keberatan dari masyarakat pada nama DCS.

“Apapun bentuk laporan kami segera menindaklanjutinya, terkait tanggapan yang dilaporkan adalah substansial, maka KPU akan berkoordinasi dengan partai politik seperti apa kebenarannya. Artinya caleg tersebut akan kami gugurkan dalam proses ini agar jangan nanti kalau sudah masuk dalam DCT masyarakat memilih kucing dalam karung,” terang Hepriyadi.

Tahapan DCS menjadi krusial karena masyarakat terlibat langsung. Jika selama ini hanya KPU yang melakukan verifikasi, saat ini masyarakat yang bisa menyampaikan langsung melihat rekam jejak caleg kepada KPU.

“Jangan takut untuk sampaikan kepada kami, baik itu melalui media sosial, melalui website KPU, atau datang langsung ke kantor. Setiap laporan yang bisa dipertanggungjawabkan akan kami tindak lanjuti,” tegas dia.

Berdasarkan aturan, salah satu syarat mencalonkan diri sebagai caleg adalah harus mengumumkan, baik di media elektronik maupun media cetak bahwa dirinya merupakan mantan napi.

Menurutnya, efektif atau tidak syarat tersebut untuk meloloskan mantan narapidana menjadi caleg ini tidak terlalu efektif. Sebab, tidak semua masyarakat mampu mengakses media yang menginformasikan hal tersebut.

“Kadang laporannya hanya formalitas, misalnya diterbitkan di media cetak, pengumuman tersebut hanya diterbitkan di sudut yang sangat kecil yang sulit dibaca, malah terkadang media yang khusus membuat laporan tersebut tidak disebarluaskan,” ujarnya.

Hepriyadi berpendapat, pengumuman tersebut harus diberi standar. Misalnya harus mempunyai pengalaman, namun ini harus dikembalikan kepada kejujuran caleg.

“Biasanya caleg tersebut mendaftarkan diri di Dapil tempat yang bersangkutan dikenal, artinya sebenarnya masyarakat di daerah tersebut sudah sangat tahu dengan sosok calon tersebut, bahwasanya sudah pernah menjalani tindak pidana, dan dihukum berapa lama,” ujarnya.

Dia mengatakan, secara administrasi mungkin sudah lulus tapi masyarakat yang bisa menentukan apakah setelah menjalani hukuman ada perubahan.

“Hukum terbaik ada di tangan masyarakat dan berharap masyarakat lebih cerdas untuk menentukan pilihan demi kemajuan bangsa,” tuturnya. ●RDR





“Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri sangat baik. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat secara langsung sangat bermanfaat”

Ade Chaniago

Banyak Pelanggaran Terjadi

PENYELENGGARA PEMILU MALAH MEMAKLUMI

Pemilu 2024 akan menjadi catatan sejarah. Sebab, ini merupakan kali pertama pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak.

Pemilu dijadwalkan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sedangkan, Pilkada akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

Ada beberapa tahapan yang dilalui dan saat ini masih dalam wilayah tidak bertuan. Pada tahapan daftar calon sementara (DCS) ini, banyak pelanggaran terjadi, namun dianggap sebagai pelanggaran yang disembunyikan.

Baik Bawaslu maupun KPU hingga kini tidak bisa memberikan sanksi apapun meski sebetulnya mereka tahu ada pelanggaran. Mereka akan bekerja sesuai tahapan yang telah diatur sesuai undang-undang yang berlaku.

Banyaknya pelanggaran di wilayah abu-abu ini membuat Barisan Pemantau Pemilihan Pemilu Republik Indonesia (BP2-RI) Sumatera Selatan merapatkan barisan dengan melakukan deklarasi dan pelantikan anggota.

Ketua BP2-RI Sumsel, Prasetya Sanjaya, menegaskan, pelanggaran sudah mulai terjadi karena tidak hanya dilakukan pada saat pelaksanaan.

“Banyak orang bilang pelaksanaan Pemilu 14 Februari dan dugaan kecurangan terjadi di hari itu. Kalau dari kajian kami, dugaan kecurangan pemilu itu dimulai dari sekarang. Jadi, hari ini kawan-kawan sudah bisa melakukan pemantauan terhadap para calon memilih,” tegasnya.

Dia mengakui, penyelenggara pemilu hanya berjumlah lima orang dan di kecamatan hanya berjumlah tiga orang. Kondisi itu tidak akan bisa jika hanya melakukan pemantauan.

“Jangan sampai seperti pemilu lalu, ada orang gila bisa memilih. Lalu pindah KTP bisa memilih, rumahnya di mana, tinggalnya di mana bisa memilih di mana,” ucapnya.

Dia mengatakan, BP2-RI Sumsel setelah melakukan deklarasi secepatnya akan melantik anggota ke tingkat kabupaten/kota. Hal itu

agar mereka segera cepat bekerja untuk memantau para calon memilih di Pemilu 2024.

“Secepatnya kita akan lantik semua barisan muda di seluruh daerah Sumsel. Tentunya kami juga akan usahakan saat pemilihan semua TPS di Sumsel akan dipantau oleh semua anggota kami sebagai relawan,” tegasnya.

Terkait adanya pelanggaran di wilayah abu-abu ini, Anggota Bawaslu Sumsel, Ahmad Naafi, menjelaskan, pelaksanaan kampanye sesuai tahapan pemilu 2024 adalah mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

“Di sinilah Bawaslu melakukan pengawasan tahapan kampanye. Berarti yang dilakukan bakal caleg yang melakukan kegiatan tersebut di luar jadwal, sedangkan jadwal kampanye belum juga ditetapkan KPU dan jajarannya,” terangnya.

Menurut Ahmad Naafi, kegiatan yang dilakukan di luar jadwal bukan dalam kewenangan Bawaslu untuk melakukan tindakan apapun terkait pemasangan spanduk, kegiatan bakti sosial dan lainnya.

Dia menegaskan, kampanye didefinisikan dengan ada ajakan memilih dan menawarkan visi misi atau citra peserta pemilu.

Unsur-unsur kampanye akan menjadi objek kajian Bawaslu sesuai Pasal 1 (35) UU 7/2017.

Terkait banyaknya spanduk, selebaran, poster serta kegiatan sosial jelang Pemilu 2024 itu kewenangan Bawaslu. Namun dalam kamus KPU tidak ada namanya waktu sosialisasi. Hanya saja tahapan proses Pemilu 2024 baru dimulai 4 November 2023.

“Jadi saat ini wilayah atau ranahnya abu-abu karena semua berstatus bakal calon. Apakah itu melanggar atau tidak, itu kewenangan dari Bawaslu. Sebetulnya untuk tahapan sosialisasi sudah diatur waktunya yakni saat bakal calon ditetapkan sebagai calon tetap,” ungkap Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin.

Amrah Muslimin mengakui, di fase DCS hingga penetapan DCT tidak aturan yang membolehkan calon peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Sementara penetapan sosialisasi yang dibolehkan KPU yakni setelah adanya penetapan DCT.

Sehingga, bisa dikatakan kegiatan yang dilakukan para bakal calon peserta pemilu telah mencuri start sosialisasi. Namun, untuk pengaturan di fase ini ternyata tidak ada regulasinya, baik di KPU atau Bawaslu.

“Kami lebih suka menyebutnya ranah abu-abu, bukan sosialisasi karena di KPU sudah ada aturannya. Kalau dikatakan apakah melakukan pelanggaran, ya bisa saja dikatakan demikian tapi juga tidak aturannya,” terangnya.

Melihat banyaknya spanduk, poster serta berbagai kegiatan pertemuan dengan calon konstituen, maka perlu diantisipasi sejak dini dan sebaiknya fase ini juga diatur agar jelas statusnya.

Terkait pelanggaran

persyaratan yang telah dibuat KPU, semuanya telah dibuat mengikat. Bila tidak memenuhi syarat maka dia akan gagal menjadi bakal calon legislatif. Hal ini juga berlaku pada syarat kesehatan dan bebas narkoba.

“Bacaleg itu akan ditetapkan bila memang telah memenuhi syarat, seperti tidak menggunakan narkoba, tidak terlibat kejahatan dan dinyatakan sehat. Semua ketentuan itu bersifat mengikat,” jelasnya.

Namun bila yang bersangkutan terlibat kejahatan, maka secara otomatis kepesertaannya dinyatakan gugur.

Pengamat politik Sumsel dari Stisipol Candradimuka Palembang, Ade Chaniago, menyebut, adanya BP2-RI dari kumpulan masyarakat, pemuda dan mahasiswa tentunya sangat baik. Karena efektifitas pengawasan memang baik dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

“Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri sangat baik. Kendati seberapa efektifitasnya tidak bisa kita ukur. Namun pengawasan dilakukan oleh masyarakat secara langsung sangat bermanfaat,” jelasnya.

Menurutnya, ada berbagai pelanggaran yang bisa terjadi di pemilu. Hal itu sudah dimulai dari verifikasi partai karena ada saja jumlah anggota yang didaftarkan tidak sesuai atau berbeda. Lalu proses pendaftaran caleg yang tidak sesuai dengan regulasi tetapi bisa lolos.

“Setelah itu diproses sekarang masuk tahap sosialisasi dan saat kampanye banyak pohon yang tidak bersalah dipaku. Semua jalan yang ada pohonnya banyak para calon minta dicoblos mencari suara. Apapun upaya untuk mendapatkan suara akan dilakukan. Hal itu semua tentunya menuai banyak larangan aturan yang terjadi,” tuturnya. ●RDR



“Secara teknis penyelenggaraan pilkada adalah kewenangan penyelenggara pemilu, bukannya kewenangan pemerintah”

Yanuar Prihatin



PILKADA MAU DIMAJUKAN KE SEPTEMBER 2024

Pemerintah berencana untuk memajukan jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Perubahan jadwal itu rencananya akan diatur lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

Dengan perppu tersebut, jadwal Pilkada yang telah disepakati pada 27 November 2024 akan dimajukan dan dilakukan dua tahap, yakni pada 7 dan 24 September 2024.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardy Gaus, mengaku telah mendengar soal keinginan pemerintah itu lewat pertemuan informal dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan sejumlah pejabat Kemendagri di sebuah hotel di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan.

“Secara informal memang kami Komisi II, kapoksi (ketua kelompok fraksi), bersama Mendagri urun rembuk, menyampaikan maksud dan tujuannya, tentang gagasan bagaimana kalau, seandainya pilkada itu dipercepat dari November ke September,” ungkap Guspardy, Kamis, 31 Agustus 2023.

Menurut Guspardy, pemerintah ingin pelantikan para kepala daerah dan pemerintah tingkat pusat dilakukan secara serentak. Ia mengatakan hal ini agar rencana pembangunan semua pemerintahan mulai tingkat pusat hingga daerah digelar bersamaan.

Guspardi menjelaskan, dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, hanya diatur soal keserentakan pencoblosan. Namun, belum diatur soal keserentakan waktu pelantikan. “Namun, untuk hal ini tidak hanya berada di KPU, Bawaslu, tapi juga ada daerah

Mahkamah Konstitusi (MK),” kata dia.

Oleh karena itu, kata Guspardy, pemerintah dan DPR juga berencana menyampaikan usulan tersebut ke MK.

Ketua Kapoksi Fraksi PDIP di Komisi II DPR, Arif Wibowo, mengatakan, fraksinya menyetujui usulan pemerintah soal perubahan jadwal Pilkada 2024. Dia ingin agar pemerintah pusat hingga daerah memulai masa pemerintahan di waktu yang sama.

“Kalau pelantikannya serentak, maka pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang tegak lurus dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Pemerintahan yang integratif,” kata Arif.

Namun, usulan tersebut masih dibahas secara informal. Dia menyebut, Komisi II DPR dan pemerintah akan membahas secara resmi. Komisi II menargetkan pembahasan soal jadwal Pilkada 2024 ini akan selesai dalam masa sidang kali ini yang akan berlangsung hingga Oktober mendatang.

“Diharapkan persidangan ini selesai. Oktober ini. Pembicaraan selesai Perppu selesai,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yanuar Prihatin, menilai pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai jadwal, yakni 27 November 2024, membuat pesta demokrasi lebih sehat dan aman dari intervensi kekuasaan. Oleh karena itu, ia mempertanyakan wacana percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 ke September yang belakangan bergulir.

Menurutnya, jika sesuai jadwal, maka Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan dalam pengelolaan pemerintahan yang baru saja terbentuk. Presiden-wakil presiden

dan anggota legislatif terpilih hasil pemungutan suara 14 Februari 2024 baru akan dilantik pada Oktober 2024.

“Namun, bila pilkada serentak dilaksanakan pada September 2024, itu berarti masih dalam rentang kendali pemerintahan yang sekarang. Secara politik tentu saja pemerintahan saat ini sedang dalam puncak konsolidasi yang kokoh. Tidak mungkin bebas kepentingan dalam Pilkada Serentak yang akan berlangsung itu,” ujarnya.

Dari sudut pandang itu, ia mengatakan, pilkada sesuai jadwal menguntungkan bagi konsolidasi demokrasi, netralitas pemerintahan sampai kebebasan partai politik mengusung calon kepala daerah. Hal tersebut juga dinilai akan memberi kenyamanan untuk kemandirian penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada 2024.

Menurutnya, anggapan sebagian pihak bahwa pemerintahan baru akan terseok-seok mempersiapkan Pilkada Serentak pada November 2024, tidak cukup beralasan.

“Secara teknis penyelenggaraan pilkada adalah kewenangan penyelenggara pemilu, bukannya kewenangan pemerintah. KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) pasti sudah mempersiapkan semuanya secara detail dan bertanggung jawab,” ujarnya.

“Siapa pun pemerintahan baru tersebut, penyelenggara pemilu tetap berkewajiban melaksanakan pilkada serentak sesuai amanat undang-undang,” sambungnya.

Yanuar juga menyoroti bahwa upaya mempercepat Pilkada 2024 saat ini

berpotensi menimbulkan prasangka publik karena terkesan dipaksakan. Terlebih, sejak tahapan Pemilu 2024 dimulai pada Juni 2022, sudah banyak isu panas yang menyerpa kesiapan penyelenggaraan pemilu dan membuat situasi politik memanas.

Isu-isu itu meliputi wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa bakti presiden menjadi tiga periode, serta pengambilan kewenangan penataan dapil (daerah pemilihan) dari pembuat undang-undang ke penyelenggara pemilu. Kemudian, debat sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, hingga mempersoalkan umur calon presiden yang kini tengah bergulir di MK.

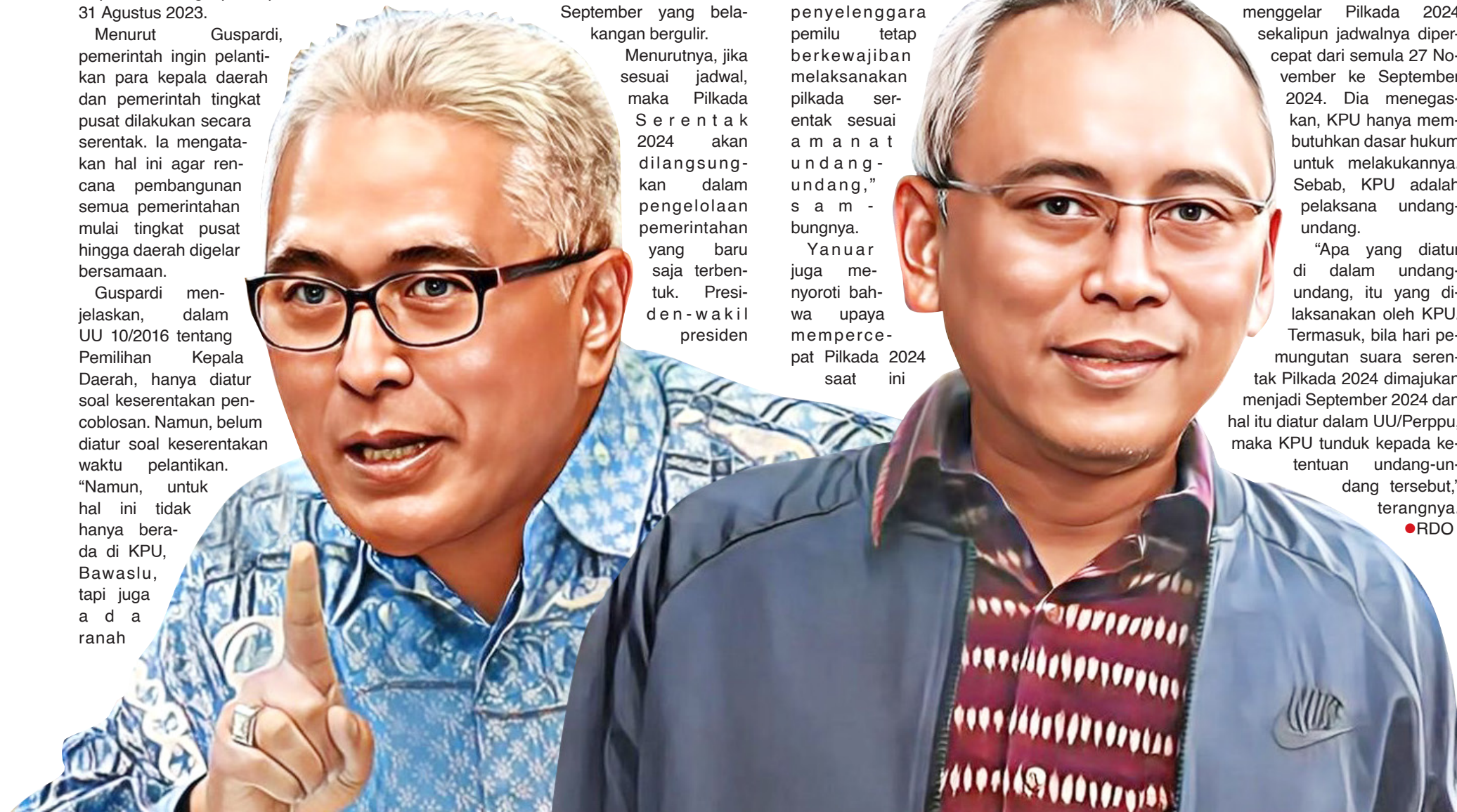
Yanuar lantas mempertanyakan alasan wacana percepatan Pilkada baru diumbar saat ini, ketika tahapan Pemilu 2024 semakin penting dan padat, serta konstelasi politik mulai mencapai klimaks. Padahal, pelaksanaan pilkada pada November 2024 merupakan amanat UU 10/2016 tentang Pilkada yang batal direvisi oleh pemerintah dan DPR pada 2021.

Ia kemudian mengklaim bahwa belum ada forum resmi yang digelar antara pemerintah dan DPR terkait rencana penerbitan Perppu untuk merevisi jadwal Pilkada 2024 sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Namun, Yanuar mengakui bahwa sudah ada wacana dan komunikasi-komunikasi informal berkaitan hal ini.

Di sisi lain, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengklaim siap menggelar Pilkada 2024 sekalipun jadwalnya dipercepat dari semula 27 November ke September 2024. Dia menegaskan, KPU hanya membutuhkan dasar hukum untuk melakukannya. Sebab, KPU adalah pelaksana undang-undang.

“Apa yang diatur di dalam undang-undang, itu yang dilaksanakan oleh KPU. Termasuk, bila hari pemungutan suara serentak Pilkada 2024 dimajukan menjadi September 2024 dan hal itu diatur dalam UU/Perppu, maka KPU tunduk kepada ketentuan undang-undang tersebut,” terangnya.

•RDO





“Jadi kita tidak hanya ekspor mentah-mentah, tapi kita olah dan berdaya tambah”

Fithra Faisal

URUSAN PEMILU JANGAN GANGGU PEREKONOMIAN

Presiden Joko Widodo meminta urusan politik terkait Pemilu 2024 jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi domestik yang telah terjaga dengan baik.

“Saya selalu menyampaikan jangan sampai urusan politik di 2024 mengganggu stabilitas ekonomi kita. Karena kalau terganggu dalam posisi dunia sulit itu kadang-kadang mengembalikannya akan sangat sulit,” kata Jokowi dalam Pembukaan Rapimnas Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) di Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023.

Menurut Presiden Jokowi, jika stabilitas ekonomi domestik terganggu di tengah situasi global yang sulit seperti saat ini, maka upaya pemulihan yang ditempuh akan banyak terkendala. Karena itu, Jokowi berpesan agar semua pihak untuk mengutamakan kinerja dalam menumbuhkan perekonomian dalam negeri dan tidak perlu tergesa-gesa soal urusan Pemilu 2024.

Kepala Negara menjelaskan, saat ini semua negara berada dalam posisi yang tak mudah. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa juga berada pada posisi yang sulit, baik dari pencapaian pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan harga barang untuk menjangkar inflasi.

“Harga-harga semuanya membubung tinggi,” ujar Jokowi.

Bahkan, kata Jokowi, ada satu negara di Eropa yang mengalami kenaikan harga komoditas energi seperti gas, listrik, dan bensin hingga 700 persen. Jokowi membandingkan kenaikan harga energi secara tipis di Indonesia, namun bisa memancing aksi demonstrasi besar.

“Bayangkan naik 700 persen, di sini naik 10-15 persen demonya tiga bulan. Itu 700 persen, coba mau demo berapa tahun. Betapa sangat sulitnya, harga pangan naik dua kali, naik 50 persen,” ujarnya.

Namun, Indonesia masih dapat menjaga inflasi di kisaran angka 3,1 persen dan

pertumbuhan ekonomi kuartal II-2023 sebesar 5,17 persen. Pencapaian itu membawa Indonesia termasuk tiga terbaik dunia.

“Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua kemarin masih tumbuh 5,17 persen, termasuk tiga terbaik dunia. Ekonomi yang baik sekarang ini yang di G20 (Group of 20), Indonesia, India, dan RRT. Yang lain-lain sangat berat. Sekali lagi, dunia penuh tantangan, baik itu krisis pangan, krisis energi, baik geopolitiknya,” ungkap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan, dirinya baru saja melakukan kunjungan kerja ke Benua Afrika. Jokowi meminta masyarakat Indonesia bersyukur, terutama karena tersedianya sumber daya air di dalam negeri.

“Begitu saya melihat di Afrika sekarang, kita ini patut bersyukur betul. Urusan air saja mereka sangat sulit, air yang menjadi sebuah kebutuhan utama, pangan apalagi. Kita patut bersyukur betul,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi juga berpesan kepada presiden selanjutnya yang terpilih untuk periode 2024-2029 agar tidak

menghentikan hilirisasi industri yang sedang dijalankan pemerintah saat ini. Pesan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) 2023 di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 31 Agustus 2023.

“Meski ditekan Uni Eropa, WTO, dan IMF, jangan mundur dan jangan berhenti. Dan nanti akan saya pesan juga pada presiden berikut yang akan datang, jangan sampai menghentikan namanya hilirisasi, karena rugi besar kita,” tegas Jokowi.

Presiden Jokowi meminta hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah tetap dilanjutkan, meski Indonesia kalah atas gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Selain WTO, Dana Moneter Internasional (IMF) juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain.

Berdasarkan perhitungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, hilirisasi akan memberikan pendapatan per kapita Indonesia sebesar USD10.500 pada 10 tahun, kemudian menjadi USD15.800 dalam waktu

15 tahun ke depan.

Sebaliknya jika hilirisasi dihentikan, Indonesia akan kehilangan pendapatan per kapita sekitar USD25.000 pada 2045 atau saat Indonesia Emas. Hal itu karena hilirisasi tidak hanya terbatas pada komoditas tambang seperti nikel dan tembaga, namun juga merambah pada komoditas pangan, seperti rumput laut dan produk minyak kelapa sawit.

Presiden Jokowi merinci bahwa Indonesia merupakan negara terbesar pengespor rumput laut, namun selama ini komoditas itu diekspor dalam bentuk bahan baku. Begitu juga dengan minyak kelapa sawit (CPO) yang memiliki produksi 46 juta ton per tahun.

Presiden Jokowi meminta industri dapat mengolah hingga menjadi barang jadi. Hilirisasi bertujuan tidak hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga membuka kesempatan kerja lebih luas.

“Di Indonesia Emas 2045 akan muncul kurang lebih USD25.000 income per kapita kita. Inilah tujuan, goal kita, tidak hanya visi besar, tetapi kita harus memiliki visi taktis,” kata Presiden.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal, mengatakan, kebijakan hilirisasi diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah dari sisi produksi sehingga memiliki nilai lebih.

“Yang jelas jalurnya adalah bagaimana membuat nilai tambah dari produk-produk kita itu kan inti dari pidato Presiden Joko Widodo bagaimana meningkatkan nilai tambah dari produk-produk kita. Jadi kita tidak hanya ekspor mentah-mentah, tapi kita olah dan berdaya tambah,” ujar Fithra.

Ia juga menyoroti kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 19 persen per tahun, sementara untuk keluar dari titel negara berpendapatan menengah capaian minimal adalah 25 persen dari PDB.

Dengan demikian, harus ada porsi manufaktur yang dapat ditingkatkan dalam industrialisasi yang di dalamnya mencakup hilirisasi.

“Kalau kita bisa mencapai target PDB 25 persen, maka minimal ekspor yang bisa kita lakukan di manufaktur itu di sekitar 9-10 persen (yoy). Kalau ini bisa tercapai, maka itu kita bisa capai target pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen per tahun yang merupakan angka rata-rata minimum yang dibutuhkan keluar dari jebakan negara pendapatan menengah. Untuk itu, maka kita industrialisasi dan hilirisasi adalah bagian dari itu,” paparnya. ●RDO



“PAN 3,1 persen dan PPP 2,1 persen, terpaksa berbagi tempat di papan bawah bersama partai non-parlemen serta partai baru lain yang ikut serta”

Fetra Ardianto



PAN BELUM AMAN TERANCAM GAGAL KE SENAYAN

Partai Amanat Nasional (PAN) kini berusia sepereempat abad. Pada usia yang ke-25 tahun ini, mereka mengklaim menjadi partai yang pro terhadap generasi muda. Hal itu dibuktikan dengan banyak kadernya dari kalangan anak-anak muda, khususnya para artis.

“Setelah 25 tahun PAN berdiri. PAN menjadi partai yang terbuka dan pro generasi muda,” kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, saat memberikan sambutan saat HUT ke-25 PAN di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2023.

Menteri Perdagangan itu menyampaikan, PAN lahir dari rahim Muhammadiyah yang sejatinya untuk memperjuangkan bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia di dalamnya.

Tidak hanya itu, pria yang akrab disapa Zulhas itu juga menyampaikan bahwa partai yang ia pimpin memiliki kedekatan dengan seluruh organisasi masyarakat keagamaan.

“PAN adalah milik anak bangsa sebagaimana logo kami matahari,” jelas Zulhas.

Dia menjelaskan, filosofi dari logo matahari tersebut adalah memberikan kasih sayang, kehidupan, dan cinta kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Siapa saja tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih, itulah Partai Amanat Nasional. Partai ini menerapkan kultur demokrasi, egaliter, merit sistem, di samping mengakomodasi dan mengakselerasi keterlibatan generasi baru politik Indonesia,” ujar Zulhas.

Dia mengatakan, pasca 25 tahun berdiri, PAN telah berupaya sekuat tenaga untuk membantu pemerintah dalam memajukan bangsa ini. Selain itu, PAN juga telah berupaya untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

“Menciptakan tatanan bernegara yang adil dan berdaulat, sebagaimana visi Partai Amanat Nasional untuk

bangsa ini ke depan adalah kemajuan dan kedaulatan,” terang Zulhas.

Di sisi lain, Zulhas juga menyinggung terkait langkah politiknya yang memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dia mengakui, bergabungnya PAN dengan Koalisi Gerindra dan PKB atas keputusan dari internal partai yang sudah dibahas bersama sebelumnya. Dia memastikan tidak ada campur tangan pihak manapun terkait dengan keputusan yang diambil oleh PAN dalam menyongsong Pilpres 2024.

“Lapor, namanya pembantu Presiden, lapor. Apalagi Pilpres, masa enggak lapor, betul enggak? Ya lapor,” terang Zulhas.

Dia menyampaikan, keputusan PAN merapat ke Koalisi Gerindra-PKB juga telah didiskusikan bersama Presiden Jokowi. Zulhas menilai, Jokowi merupakan sosok pemimpin hebat, sehingga dirinya meminta masukan kepada mantan Wali Kota Solo tersebut.

“Ya kita lapor, kita diskusi,” ucap Zulhas.

Kendati demikian, dirinya menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak memberikan arahan apapun terkait sikap politik yang diambil oleh PAN. “Tidak ada arahan. Kita yang lapor, bukan diminta,” kata Zulhas menegaskan.

Selain itu, Zulhas juga menyinggung terkait dengan

dukungan PAN terhadap Erick Thohir. Dirinya mengaku sudah kenal lama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

“Saya kenal lama. Pak Erick Thohir merah putih,” jelas Zulhas.

Dia mengaku PAN telah mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat Indonesia. Terlebih atas apa yang sudah dilakukan PAN selama 25 tahun ini. “Terima kasih atas kepercayaan kepada Partai Amanat Nasional yang semakin hari semakin meningkat,” tutur Zulhas.

Sementara itu, klaim Zulhas yang menyatakan PAN telah mendapatkan kepercayaan dari publik berbanding terbalik dengan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta (LSJ).

Berdasarkan hasil survei terbaru dari LSJ, PAN pada Pemilu 2024 mendatang diprediksi tidak akan melenggang ke

Senayan. Bahkan, PAN akan mengikuti jejak dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“PAN 3,1 persen dan PPP 2,1 persen, terpaksa berbagi tempat di papan bawah bersama partai non-parlemen serta partai baru lain yang ikut serta,” kata

Peneliti Senior LSJ, Fetra

Ardianto, Senin, 28 Agustus 2023.

“PAN 3,9 persen dan PPP 2,1 persen,” kata Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakty, Jumat, 1 September 2023.

Dia menyampaikan, hasil survei LSN menunjukkan bahwa jika saat ini dilaksanakan Pemilu, PDIP akan keluar sebagai pemenang dengan elektabilitas 19,4 persen.

“Namun dominasi PDIP Perjuangan terus dibuntuti oleh perkembangan elektabilitas Partai Gerindra yang begitu progresif. Sebanyak 17,3 persen responden mengaku memilih Partai Gerindra jika pemilu dilaksanakan saat ini,” ujar Gema.

Dia menilai, elektabilitas PDIP cenderung stagnan, bahkan sedikit menurun. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya faktor ekor jas (coattail effect).

“Ditunjuknya Ganjar sebagai capres ternyata tidak terlalu berpengaruh pada elektabilitas PDIP Perjuangan,” terang Gema.

Sementara itu, Partai Demokrat, Partai NasDem dan Partai Golkar dengan selisih elektabilitas yang sangat tipis berebut posisi sebagai ranking ketiga.

“Sedangkan Partai Perindo setelah encapai elektabilitas 5,2 persen cenderung lengah atau mungkin berpuas diri, sehingga dalam survei kali ini tidak mengalami kenaikan,” tandas Gema. •RDO





“Karena ada indikasi PPP
sepertinya tidak begitu ny-
aman dengan koalisi di PDIP,
maka komunikasinya bisa
mengarah pada pembentu-
kan poros keempat”

Herry Mendrofa

DEMOKRAT-PPP BISA MERAPAT BENTUK POROS KEEMPAT

Keputusan Surya Paloh yang berencana menduetkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar memang sangat mengejutkan. Namun, lewat prahara itu, peluang munculnya poros keempat di Pilpres 2024 kini terbuka.

Keputusan Ketua Umum Partai Nasdem itu berhasil memberikan efek kejut kepada Partai Demokrat dan PKS yang merupakan rekan satu perjuangan dalam mengusung Anies Baswedan menjadi capres di 2024 lewat Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP).

Buntut dari sikap Nasdem yang telah memutuskan cawapres secara sepihak tersebut akhirnya membuat Partai Demokrat mengambil keputusan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan.

Di sisi lain, kini publik menanti-nanti babak baru apakah sikap PKS selaku rekan satu koalisi akan sama dengan keputusan Demokrat. Sebab, jika PKS mengambil keputusan hengkang dari Koalisi Perubahan, kemungkinan akan ada poros baru atau poros keempat dalam peta politik Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai, jika PKS mengambil jalan keputusan yang sama dengan Demokrat hengkang dari KPP, maka potensi untuk munculnya poros keempat dalam Pilpres 2024 kemungkinan bakal terwujud.

Sebab, menurut Herry, Demokrat sejatinya tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menggandeng partai politik lain membuka jalur baru untuk membentuk poros keempat di Pilpres 2024.

Di sisi lain, posisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ngotot mengusung Sandiaga Uno sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, juga membuka peluang Partai Demokrat untuk membangun kerja sama membentuk poros baru.

Herry menilai, sikap PDIP yang tak kunjung mem-

berikan keputusan untuk Sandiaga Uno mendampingi Ganjar dapat membuat PPP tak lagi nyaman untuk membangun kerja sama politik di Pilpres 2024.

“Ya untuk kalkulasinya, arahnya bisa membuat poros keempat. Karena ada indikasi PPP sepertinya tidak begitu nyaman dengan koalisi di PDIP, maka komunikasinya bisa mengarah pada pembentukan poros keempat,” kata Herry saat dihubungi, Jumat, 1 September 2023.

Selain itu, Herry melihat, keretakan komunikasi antara Nasdem, Demokrat dan PKS buntut keputusan sepihak yang dilakukan oleh Surya Paloh meminang Cak Imin mendampingi Anies Baswedan telah membuat luka mendalam bagi AHY. Apalagi, AHY sebelumnya telah dijanjikan menjadi cawapres Anies.

“Jadi sudah pasti (Demokrat kecewa) karena komunikasi politik di dalam internal koalisi terhambat dengan keputusan yang tiba-tiba,” ujar Herry.

Herry menuturkan, terdapat variabel yang muncul apabila PKS memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan mengikuti Demokrat. Pertama, dua partai itu bisa saja membentuk koalisi baru. Kedua, PKS dan Demokrat bisa saja berlabuh kepada Ganjar ataupun Prabowo.

Namun, Herry menilai, apabila kedua partai itu menginginkan distribusi kekuasaan, maka dapat

dipastikan harus meng-
gusung
Ganjar
di Pil-
pres

2024.

“Saya rasa karena kesamaan platform, Demokrat dan PKS bisa saja ke Prabowo, namun jika dalam perjalanannya mempertimbangkan peluang untuk distribusi kekuasaan, PDIP bisa menjadi alternatif,” ungkap Herry.

Herry menambahkan, dalam konteks ini, perseteruan di internal Koalisi Perubahan buntut sikap Nasdem yang meminang Cak Imin menjadi cawapres Anies malah memberikan efek ekor jas kepada kedua lawannya, khususnya Ganjar Pranowo.

“Jelas yang diuntungkan adalah pihak yang juga dipilih oleh Demokrat dan PKS, bisa dikatakan kalau menurut saya ya jika pilih PDIP Ganjar, jika pilih KIM ya Prabowo,” ujar Herry.

Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farhan, menilai keputusan Surya Paloh meminang Cak Imin menjadi cawapres Anies memang cukup mengejutkan publik. Hal itu lantaran keputusan itu diluar dugaan karena sejatinya PKB bukanlah partai yang berada di dalam Koalisi Perubahan.

Yusak menuturkan, keputusan Surya Paloh yang telah secara tiba-tiba meminang Cak Imin menjadi cawapres telah berbuntut rasa kekecewaan dan amarah Partai Demokrat sehingga akan berpotensi berlabuh ke Koalisi lain atau membentuk poros keempat.

“Apakah dengan masuknya Cak Imin sebagai Cawapresnya Anies, Demokrat berpotensi loncat? Ya saya kira peluang itu sangat terbuka karena Demokrat sejauh ini kan memang sudah bekerja untuk mengimbangi dominasi Nasdem di koalisi perubahan yang sangat kental sekali,”

ungkap Yusak.

Kendati demikian, Yusak melihat, peluang munculnya poros keempat dalam peta politik Pilpres 2024 kemungkinan cukup jauh dapat ditempuh oleh Partai Demokrat. Sebab, saat ini, PKS ataupun PPP belum memberikan reaksi ataupun sinyal untuk membentuk satu kekuatan baru bersama Partai Demokrat.

“Nah, apakah ada kaitannya dengan hadirnya poros keempat, saya kira potensi itu tetap ada, tetapi kalau kita melihat PPP sendiri kan sudah melakukan dukungan di Ganjar Pranowo, meskipun pakai bargaining cawapres Sandiaga Uno belum diberikan lampu hijau oleh Mega,” terang Yusak.

Yusak menilai, keinginan PPP dan PKS hengkang dari Ganjar dan Anies kemungkinan tidak seserius Demokrat dan PKB. Hal itu lantaran saat ini kedua partai tersebut belum juga memberikan reaksi keras atas sikap PDIP dan Nasdem dalam koalisi masing-masing.

“Saya kira keinginan untuk loncat itu tidak sekuat PKB ya. Artinya, kalau pun Sandiaga Uno tidak diberikan kursi cawapres oleh Pak Ganjar, saya kira PPP tetap akan bertahan dengan posisi di Ganjar Pranowo,” terang Yusak.

“Nah, kalau PKB ini kan kasusnya agak berbeda, satu dia adalah partai yang paling pertama merajut koalisi dengan Gerindra,” sambung Yusak.

Selain itu, yang paling memungkinkan untuk terjadinya perubahan konstelasi politik jelang Pilpres 2024 yakni PKS juga harus segera menentukan sikap seperti Demokrat, apakah tetap berada di dalam atau keluar.

Yusak menerangkan, kemunculan poros baru dalam peta politik jelang Pilpres 2024 yang bakal dibangun Demokrat sejatinya tidak seimbang dengan tiga poros yang saat ini sudah terbentuk. Sebab, posisi poros baru jika nanti terbentuk bakal juga mengalami masalah lantaran minimnya sosok yang akan dijadikan capres untuk bertarung dengan tiga kandidat lainnya.

“Sulit bagi Demokrat, PKS kemudian PPP untuk membangun koalisi baru karena akan terbentur juga pada persoalan siapa yang akan menjadi capres. Karena tingkat elektabilitas capres yang ada sekarang ini kan berpusat pada tiga poros utama, Pak Ganjar, Prabowo dan Anies Baswedan,” kata Yusak.

Yusak menambahkan, yang paling memungkinkan untuk Partai Demokrat dalam menghadapi situasi politik hari ini adalah harus menentukan sikap apakah bergabung dengan Prabowo atau Ganjar Pranowo.

“Demokrat loncat kan pertanyaannya, tinggal ke Prabowo atau Ganjar Pranowo kan? Kalau secara chemistry karena Demokrat berada di luar pemerintahan ya saya kira kecenderungan untuk berlabuh di Prabowo sangat terbuka, mungkin tidak dalam posisi AHY sebagai cawapresnya Pak Prabowo kan,” pungkasnya. ●RDO



“Kita bukan berbicara angka 15 dan 24 (orang napi nyaleg), tapi kualitas demokrasi dipengaruhi kuantitas orang-orang yang rekam jejaknya sudah buruk”

Bivitri Susanti



Caleg Mantan Napi Koruptor Terbanyak

NASDEM BERBISNIS POLITIK

Pencalonan mantan terpidana kasus korupsi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 terungkap mencapai puluhan orang yang memenuhi syarat (MS) masuk ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS), yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 18 Agustus 2023.

Mantan terpidana kasus korupsi sebenarnya tidak masalah menjadi calon anggota legislatif selama memenuhi syarat yang diatur UU 7/2017 tentang Pemilu, tepatnya yang tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf G, bisa dipenuhi. Apalagi, aturan tersebut sudah direvisi Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya dalam Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022.

Aturan tersebut menyatakan, mantan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih harus mengumumkan kepada publik tentang status mereka yang pernah tersangkut hukum di media pemberitaan resmi. Juga menunggu masa jeda lima tahun setelah bebas dari tahanan.

Tetapi, mantan koruptor justru dianggap sebagai masalah besar di masyarakat belakangan hari ini, karena aturan yang ada tersebut tidak dituangkan sesuai teks yang disampaikan MK oleh KPU.

Alhasil, Indonesia Corruption Watch (ICW) menggugat Peraturan KPU ke Mahkamah Agung (MA), karena KPU tidak mengungkapkan mantan narapidana korupsi yang masuk DCS untuk Pileg 2024, dan membuka keran bagi mereka bisa lolos dengan tanpa diperhatikan

masyarakat luas.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Kurnia Ramadhana, menjelaskan, PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota Legislatif DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota, serta PKPU 11/2023 tentang Pencalegan DPD tidak membuka ruang transparansi informasi profil bakal caleg, termasuk mantan napi kasus korupsi. Ditambah, terdapat tanda-tanda melencengnya KPU dari semangat antikorupsi yang menurutnya jelas terlihat pada pengaturan masa jeda dibelokkan maknanya.

“Di sana kami melihat jelas, KPU berpihak kepada koruptor dan melanggar putusan MK. KPU entah dapat wangsit dari mana, tiba-tiba menambahkan syarat pidana tambahan pencabutan hak politik,” ujar Kurnia dalam diskusi ICW yang diposting ulang di kanal Youtube resminya, dan dikutip Info Indonesia, Jumat, 1 September 2023.

Dalam rilisnya, ICW menyebutkan puluhan nama mantan terpidana korupsi lolos masuk ke dalam DCS, baik yang terdaftar sebagai bakal caleg DPR RI dan DPD RI maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rinciannya, jumlah yang nyaleg DPR dan DPD RI sebanyak 15 orang, sementara yang nyaleg untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 24 orang.

Dari total itu, Info Indonesia mendapati jumlah bakal caleg yang mantan napi korupsi terbanyak maju dari Partai NasDem, terutama yang nyaleg DPR RI dan DPD RI. Sementara, dari total 18 parpol yang dinyatakan lolos oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2024, selain NasDem ada

3 Parpol lainnya yang juga mendaftarkan mantan terpidana kasus korupsi sebagai bakal caleg 2024, yakni PKB, Golkar, dan PDIP.

Jika merujuk rincian data ICW atas temuan data bakal caleg mantan terpidana korupsi itu, didapati Partai Nasdem yang paling banyak mendaftarkan nama

mantan koruptor. Salah satunya ada Eep Hidayat, mantan terpidana korupsi biaya pungut pajak bumi dan bangunan (BP PBB) Kabupaten Subang 2005-2008. Dia maju sebagai bakal caleg DPR RI dari Partai Nasdem Dapil Jawa Barat IX dan bermodal nomor urut 1.

Selain itu, ada Budi Antoni Aljufri, mantan terpidana kasus suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang. Maju bakal caleg DPR RI dari Partai Nasdem Dapil Sulawesi Selatan II dan bermodal nomor urut 9.

Ada juga nama Abdillah, mantan terpidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD. Maju Bacaleg DPR RI dari Partai Nasdem Dapil Sumatera Utara I dan bermodal nomor urut 5.

Di samping tiga nama itu, ada dua nama mantan terpidana korupsi yang didaftarkan Partai NasDem sebagai bakal caleg. Yaitu, Rahudman Harahap, mantan terpidana korupsi dana tunjangan aparat desa Tapanuli Selatan saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan. Dia maju Bacaleg DPR RI dari Partai Nasdem Dapil Sumatera Utara I dan bermodal nomor urut 4.

Lalu, Abdullah Puteh, mantan terpidana korupsi pengadaan 2 unit helikopter saat menjabat Gubernur Aceh. Dia maju Bacaleg DPR RI dari Partai Nasdem Dapil Aceh II dan bermodal nomor urut 1.

Sementara, Golkar hanya mencatat satu orang mantan terpidana korupsi, yakni terkait distribusi minyak goreng Bulog, Nurdin Halid, yang maju Bacaleg DPR RI dari Partai Golkar Dapil Sulawesi Selatan II dan bermodal nomor urut 2.

Sama seperti Golkar, PKB juga mendaftarkan satu nama mantan terpidana korupsi, yakni dalam perkara pengamanan Pilkada Jawa Barat 2009 dan korupsi penanganan PT Salmah Arowana Lestari, Susno Duadji. Dia maju sebagai bakal caleg DPR RI dari PKB Dapil Sumatera Selatan II dan bermodal nomor urut 2.

Sedangkan PDIP, tercatat mendaftarkan 2 nama mantan terpidana korupsi yang di antaranya Al Amin Nasution mantan terpidana kasus suap Sekda Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dia maju sebagai bakal caleg DPR RI dari PDIP Dapil Jawa Tengah VII dan bermodal nomor urut 4. Juga Rokhmin Dahuri mantan terpidana korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan yang maju sebagai bakal caleg DPR RI dari PDIP Dapil Jawa Barat VIII dan bermodal nomor urut 1.

Mengetahui hal tersebut,

pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai kasus bakal caleg terpidana korupsi membanjiri DCS Pileg 2024 memang secara

regulasi diperbolehkan. Tetapi sayangnya, kasus Partai NasDem mendaftarkan cukup banyak mantan koruptor menggambarkan politik sudah menjadi arena berbisnis parpol.

“Itu menunjukkan fakta partai politik di Indonesia lemah dalam pengkaderan, juga lemahnya partai politik dalam komitmen membangun citra partai yang bersih dari kasus korupsi,” ujar Efriza kepada Info Indonesia, Jumat, 1 September 2023.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai temuan ICW itu mencerminkan penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Sebabnya, hal tersebut terbuka lebar berkat dua PKPU membuka keran mengizinkan mereka dalam ceruk kontestasi yaitu Pileg DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta DPD RI.

“Kita bukan berbicara angka 15 dan 24 (orang napi nyaleg), tapi kualitas demokrasi dipengaruhi kuantitas orang-orang yang rekam jejaknya sudah buruk. KPU bilang, karena tidak diperintahkan undang-undang, maka tidak diberikan catatan koruptor dan yang bukan,” ungkap Bivitri.

Mantan Ketua KPU, Arief Budiman, juga turut mengomentari polemik pencalegan terpidana korupsi yang diungkap ICW tersebut. Pasalnya, dia merasa heran dengan KPU periode 2022-2027 yang tidak membuat kebijakan ketat bagi mereka dalam mendukung gerakan antikorupsi di Indonesia.

“Pemberantasan korupsi tentu menjadi semangat kita semua. Dan tentu cara, metode pemberantasannya, termasuk timingnya untuk memberantas korupsi itu harus sesuai kewenangan masing-masing pihak. KPU tentu punya kewenangan institusional, kelembagaan untuk bisa mendorong perang melawan korupsi by system,” urai dia.

Arief memberikan contoh metode pemberantasan korupsi yang diaplikasikan KPU di era kepemimpinannya, periode 2017-2022. Yaitu, memulai dari tahap paling awal ketika suatu tahapan Pemilu hendak dimulai, yang pada pokoknya ada saat merancang PKPU yang mengatur tentang keikutsertaan mantan terpidana korupsi dalam proses pencalegan.

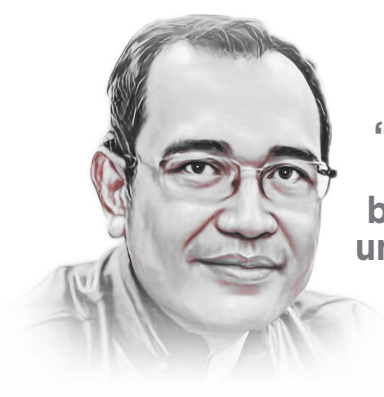
“Yang kami lakukan adalah terkait dengan pelaporan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Kami berkomunikasi insentif dengan teman-teman di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Karena ada report yang menunjukkan laporan LHKPN tidak pernah mencapai angka 100 persen untuk semua pejabat publik yang terpilih melalui pemilu,” paparnya.

Melalui kebijakan itu, Arief memastikan anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Provinsi, hingga anggota DPR RI maupun DPD RI yang ikut pemilu wajib memenuhi syarat pelaporan LHKPN ke KPU.

“Nah, ketika saya di KPU, kami membuat aturan, ‘kalau Anda mau nyaleg harus lapor LHKPN dulu. Kalau tidak melapor, maka keterpilihan Anda itu tidak kami teruskan untuk pelantikan’. Jadi ditunda, tunggu dulu. Sampai LHKPN-nya terkumpul baru bisa ikut proses pelantikan,” ungkapnya.

“Karena itu, capaian laporan LHKPN pejabat yang terpilih itu 100 persen. Makanya saya heran, kok kemarin laporan LHKPN tidak dimintakan di awal, dimintakan sebelum pelantikan,” pungkas Arief. ●RDO





“Duet Anies-Cak Imin sebetulnya hanya sebuah gerakan uji coba untuk melihat reaksi di tingkat bawah”

Ardiyan Saptawan

AHY DITIKUNG ANIES KADER DAERAH IKUTAN MARAH

Wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ternyata menimbulkan reaksi luar biasa di daerah. Pasangan ini memang belum resmi disampaikan dan dianggap sebagai tes balon pencapresan. Siapa yang dulu menembak, maka dialah yang paling terganggu.

Partai Demokrat sangat kecewa dengan keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang menjodohkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Pasangan Anies-Cak Imin dibuat atas manuver Surya Paloh tanpa persetujuan Partai Demokrat sebagai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sekjen Partai Demokrat yang juga anggota Tim Delapan, Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan Anies menghubungi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada 12 Juni 2023, yang mengaku mendapat telepon beberapa kali dari ibu dan guru spiritual. Riefky mengungkapkan, Anies diminta segera berpasangan dengan AHY.

Dia menjelaskan, didukung mandat yang diberikan ketiga pimpinan partai Koalisi Perubahan, yaitu Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikh, dan AHY, maka pada 14 Juni 2023, Anies memutuskan AHY sebagai pendampingnya.

Di daerah, wacana duet Anies-Cak Imin ini menimbulkan reaksi keras dari kader Partai Demokrat. Mereka juga mulai beramai-ramai menukarkan spanduk bergambar Anies-AHY

bagai bentuk reaksi kekecewaan.

“Jika itu benar (Anies-Cak Imin), maka mayoritas kader Partai Demokrat akan mundur mendukung Anies sebagai capres. Kalau pun mendukung rasanya sudah tidak maksimal lagi,” ungkap kader Partai Demokrat Sumatera Selatan, Junjati Patra.

Ketua Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPD Partai Demokrat Sumsel ini mengatakan, meski belum ada keputusan resmi soal wacana Anies -Cak Imin, namun hal tersebut sudah menimbulkan kekecewaan bagi kader di daerah. Padahal, koalisi yang tercipta selama ini dibangun berdasarkan keputusan bersama.

Ada berbagai reaksi di antaranya para kader menurunkan spanduk Anies -AHY. Bahkan, ada juga relawan dari Partai Demokrat yang menyatakan mundur bila nama AHY digeser orang lain.

“Kalau memang AHY tidak jadi cawapres Anies, ya tentu kami juga tidak akan semaksimal seperti yang diharapkan. Kalau perintah partai, kami akan tegak lurus ke AHY. Apa kata dia kami akan taat. Tapi kalau soal memilih, kami tidak menjamin tegak lurus kalau AHY tidak dicalonkan,” tegas Junjati.

Junjati berharap agar elit partai di Koalisi Perubahan dapat memahami kebatinan para kader di bawah dan jangan hanya memutuskan berdasarkan kepentingan sepihak. Sehingga tidak saling dikecewakan.

“Apakah koalisi ini bisa pecah, ya kemungkinan itu tetap ada, namun hal itu kita putuskan kepada pemimpin partai lah. Namun, jelas kami akan merespons cepat semua perubahan yang terjadi,” terang mantan jurnalis ini.

Lain hal dengan kader Partai Nasdem yang menyikapinya dengan tenang. Meski hingga kini belum ada keputusan resmi apakah Anies akan berpasangan

dengan Cak Imin, namun semua keputusan tersebut bernilai positif karena sudah ada hitung-hitungannya.

“Kami menyikapinya positif, artinya kalau Anies -Cak Imin memang benar terjadi, maka koalisi ini makin kuat. Walau mungkin ada yang beranggapan lain, ya tergantung dari persepsi masing-masing. Yang jelas kami dari Partai Nasdem siap mendukung siapapun wakilnya Anies nanti,” terang Zain Ismed.

Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sumsel ini mengungkapkan, ada perhitungan politik yang matang dari Surya Paloh bila ingin menduetkan Anies dan Cak Imin. Apalagi, Cak Imin adalah Ketua Umum PKB yang cukup dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Kemudian, basis utama PKB adalah Jawa Timur yang menjadi salah satu daerah paling menentukan di Indonesia. Selain itu akan menambah besar jumlah Koalisi Perubahan dari tiga partai menjadi empat partai.

“Namun duet Anies-Cak Imin ini kan masih melihat kondisi, belum diformalkan, sehingga masih terus mengalami perubahan. Intinya tidak perlu reaksi yang berlebihan lah dan berpikir positif saja,” terang Ketua Dewan Koperasi (Dekopi) Sumsel ini.

Tes Balon Politik

Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Ardiyan Saptawan, berpendapat, duet Anies-Cak Imin

sebetulnya hanya sebuah gerakan uji coba untuk melihat tingkat reaksi di tingkat bawah. Dari tiga koalisi yang ada sekarang, Koalisi Perubahan dinilai paling solid, sehingga perlu hembusan sedikit mempelajari reaksi dari kelompok ini.

“Istilahnya tes balon lah. Mereka melemparkan balon itu ke udara, kemudian siapa yang paling bereaksi. Di situ akan kelihatan siapa paling dulu menembak balon itu dan hal ini memang sengaja dihembuskan untuk melihat sejauh mana reaksinya,” ungkap Ardiyan Saptawan.

Dosen Fakultas Fisip Unsri ini mengungkapkan, wacana duet tersebut berawal saat Anies nyekar ke makam di Jawa Timur yang ternyata reaksinya sangat besar. Padahal tidak ada pertemuan apapun antara Anies dan Cak Imin, namun dibuat seolah-olah mereka jadi berduet.

“Duet ini sengaja dimainkan untuk melihat gimmick politik. Makanya dilakukan tes balon untuk melihat reaksinya. Baru setelah itu cek ombak untuk melihat seberapa besar reaksi duet ini. Sebetulnya wacana duet menduet ini hal biasa seperti duet Ganjar -Anies. Kemudian Prabowo-Anies. Nah, di bulan September ini tensinya semakin tinggi,” ucapnya.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel ini mengungkapkan, menduetkan Anies -Cak Imin bukan hal yang mudah dan butuh proses. Cak Imin adalah Ketua Umum PKB yang sudah berduet dengan Partai Gerindra serta sudah memutuskan untuk menjadikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Koalisi ini semakin kuat dengan masuknya PAN dan Partai Golkar hingga mampu mengancam eksistensi PDIP yang mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres dari garis nasionalis.

Di sisi lain, Koalisi Perubahan yang diusung Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat juga sangat solid karena lebih mengedepankan basis religius. Kekuatan nasionalis, idealis, dan religius di Pilpres 2024 ini sebetulnya merata dan mereka saling membutuhkan. Sehingga timbulah isu duet menduet untuk melihat reaksi di bawah.

“Jadi sebetulnya kekuatan koalisi ini merata dan hanya beda tipis. Sekarang tinggal menentukan wakilnya saja, karena merekalah yang memegang kunci kemenangan itu,” ucapnya.

•RDR



“Kampus dan sekolah tempat menuntut ilmu tidak layak untuk jadi panggung politik. Tentunya itu bisa saja merusak moral generasi muda jadi ikutan berkelompok dan terkotak-kotak oleh politik”

Sri Sulastri



TAK MASALAH KAMPANYE DI KAMPUS DAN SEKOLAH

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan tempat ibadah dilarang menjadi lokasi kampanye karena berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama.

Namun, MK mengizinkan kampanye dilakukan di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat yang dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Wahyu Perdana Kusuma, menjelaskan, secara koordinasi mereka belum membahas apakah akan ada penolakan atau tidak. Sehingga kegiatan kampanye masuk lingkungan kampus masih dikaji oleh semua BEM di seluruh wilayah Sumsel dan akan ada pembahasan lebih lanjut.

“Sampai saat ini, secara umum, kami dari BEM mahasiswa se-Sumsel belum ada obrolan apakah akan kita tolak atau obrolan perihal gerakan aksi penolakan,” terang Wahyu.

Menurutnya, BEM FH UMP masih memiliki pemikiran memberikan ruang untuk parpol dan para calon untuk kampanye dengan beragam catatan.

“Kalau selagi masih ada koridor pengawasan dan tanggung jawab yang mempunyai tempat (izin ke pihak universitas) tidak

masalah. Terpenting itu mereka jangan menggunakan atribut kampanye,” tegasnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan, Kurniawan, mengaku pihaknya juga masih mengkaji keputusan MK tersebut. Karena Bawaslu juga akan turun mengawasi semua kampus di Sumsel.

“Secara teknis tentunya KPU Sumsel yang buat, kami sebagai pengawas. Karena belum ada teknisnya seperti apa dari KPU Sumsel, sekarang keputusan MK itu juga di sini tengah kami kaji. Di Sumsel tidak hanya Kota Palembang, di seluruh kabupaten/kota juga ada kampus. Seperti di Lubuklinggau, OKU Raya, Lahat dan lainnya,” kata Kurniawan.

Namun, pihaknya sementara sudah melakukan kajian larangan-larangan kampanye di kampus dan sekolah. Di antaranya tidak mengganggu proses belajar mengajar, tidak boleh memberikan voucher atau dalam bentuk lain, serta merusak fasilitas dan membawa massa yang terlalu banyak.

“Voucher itu maksudnya biasa orang kampanye nanti memberikan sesuatu itu tidak boleh. Kalau soal massa mereka hanya boleh kampanye yang datang tim saja, tidak boleh ada massa,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sumatera Selatan, Amrah Muslimin, menyatakan, keputusan MK itu mutlak sama seperti bisa mengharuskan sesuatu yang halal. Itulah nilai sebuah keputusan MK yang memang tujuannya memutuskan sesuatu yang

awalnya seakan-akan haram menjadi halal.

“Artinya itu sekarang jelas diperbolehkan kalau sudah ada keputusan MK. Tetapi kami dari KPU Sumsel belum mendapatkan teknis kampanye seperti apa dari KPU pusat. Kami belum menerima PKPU-nya, jadi untuk teknisnya belum diketahui seperti apa nanti,” jelasnya.

Dia menggambarkan teknis untuk berkampanye di kampus dan sekolah akan dilakukan dengan santun. Karena kampanye itu dikemas dengan konsep edukasi atau pendidikan, bukan seperti kampanye di tempat umum lainnya.

“Misalnya diadakan debat politik dan mengundang para calon dan partai lain. Pastinya harus dikemas cocok dengan dunia pendidikan,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, meskipun kampanye di kampus sudah halal alias diperbolehkan oleh MK, tetapi sifatnya tidak mutlak. Kondisi itu hanya memperbolehkan dan bukan keharusan.

“MK hanya memperbolehkan, bukan diharuskan kampanye di kampus dan sekolah. Kalau seandainya pihak sekolah dan kampus menolak, mereka tidak boleh kampanye.

Sama seperti kita melakukan kegiatan harus izin tempat. Seandainya tempat itu tidak memberikan izin yang tidak bisa,” terangnya.

S i k a p
positif diberikan bakal caleg muda dari Partai Nasdem, M Aidil Is-

kandarsyah, yang menilai wilayah sekolah dan kampus tidak masalah jadi tempat sosialisasi. Selain mengajarkan politik sejak dini, setidaknya mereka juga punya pilihan atau sikap politik.

Selama ini, kata dia, pendidikan politik secara nyata tidak pernah diajarkan di sekolah dan kampus, sehingga mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukan meski punya hak pilih.

“Di sekolah, ada yang sudah punya hak pilih, ada yang belum, tapi setidaknya kita sudah diajarkan tentang perbedaan politik melalui berbagai pilihan ditawarkan. Kalau saya setuju ada sosialisasi di kampus dan sekolah untuk memaparkan berbagai program yang ditawarkan, asal bukan melakukan money politic,” ujar Bendahara Garda Pemuda Nasdem Kota Palembang ini.

Bakal caleg berusia 23 tahun ini menilai, pendidikan politik langsung di sekolah dan kampus cukup baik asal tidak mengajarkan perbedaan yang berujung pecah belah, tidak mengajarkan kebencian atau saling menjelekkkan, serta mempengaruhi siswa dan mahasiswa untuk berbuat adu domba.

Sementara, pengamat hukum dan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Sumsel, Sri Sulastri, menilai keputusan itu seharusnya ditinjau ulang oleh MK.

Dia beralasan kampus dan sekolah adalah area sakral untuk berpolitik. Dia tidak ingin generasi muda Indonesia ikut berpikir seperti orang yang berpolitik.

“Kampus dan sekolah tempat menuntut ilmu tidak layak untuk jadi panggung politik. Tentunya itu bisa saja merusak moral generasi muda jadi ikutan berkelompok dan terkotak-kotak oleh politik. Tidak usah anak yang masih muda seperti mereka, orang-orang sudah tua, dewasa, di dunia politik saja ribut jadi terpecah belah oleh politik,” paparnya.

Dosen Fakultas Hukum UMP ini juga menilai konyol harus berkampanye di sekolah. Karena tidak banyak siswa dan siswi bisa mencoblos.

“Apa umur siswa dan siswi sekolah itu cukup untuk mencoblos. Walaupun ada paling hanya beberapa yang umurnya cukup,” kata dia.

Dia menyebut kemungkinan besar akan banyak pelanggaran yang terjadi. Hal itu menyikapi aksi kampanye di sekolah tersebut.

“Di sekolah mengganggu siswa yang lagi belajar. Belum lagi aspek-aspek lain yang bisa menimbulkan konflik apabila mahasiswa harus mempunyai pilihan yang berbeda,” ucapnya. ●RDR





“Tentunya, sebagai ketua partai, sebagai kader harus mengikuti instruksi ini dan siap melaksanakannya”

Miky Junita Linda Wenur

INFO
DAPIL

Minggu I • September 2023

23

GOLKAR SULUT AMANKAN SUARA PRABOWO

Partai Golkar resmi bergabung dengan Partai Gerindra yang kini bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024.

Gerak cepat dilakukan DPD Partai Golkar Sulawesi Utara pasca deklarasi dukungan DPP Partai Golkar kepada Prabowo Subianto. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat Nomor SI-06/DPD-PG/SULUT/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023. Surat itu ditandatangani Ketua DPD Partai Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu (CEP), dan Sekretaris Raski A Mokodompit.

Surat tersebut menginstruksikan kepada para pengurus Partai Golkar di kabupaten dan kota di Sulut, para anggota

Fraksi Partai Golkar di DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta para bakal calon anggota legislatif (caleg) untuk mendukung dan mensosialisasikannya.

Ada empat instruksi yang wajib dilaksanakan jajaran Partai Golkar di Sulut. Pertama, segera menyosialisasikan Prabowo Subianto sebagai bakal capres pada Pilpres 2024 sesuai deklarasi dukungan empat partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan PAN.

Kedua, segera mengonsolidasikan seluruh pengurus DPD Partai Golkar kabupaten/kota, pengurus kecamatan, pengurus desa/kelurahan, FPG DPRD provinsi dan kabupaten/kota, caleg DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Utara untuk kemenangan Prabowo Subianto.

Ketiga, segera mengadakan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan sesama partai pengusung. Keempat, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Tomohon, Miky Junita Linda Wenur, menyatakan siap melaksanakan instruksi

tersebut.

“Tentunya, sebagai ketua partai, sebagai kader harus mengikuti instruksi ini dan siap melaksanakannya. Kami akan teruskan kepada para pengurus tingkat kota, anggota fraksi di DPRD Kota Tomohon, pengurus kecamatan hingga ke kelurahan, serta para bakal caleg dari Partai Golkar yang akan berkompetisi di Pemilu 2024,” kata Ketua DPRD Kota Tomohon 2014-2019 itu.

Diketahui, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB dan PAN sepakat memberi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres dalam Pilpres 2024. Selain empat partai parlemen itu, Partai Bulan Bintang (PBB) juga memberi dukungan kepada Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan. ●RDO



Pertarungan Nama Besar Caleg Minahasa Tenggara

Perebutan kursi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Ratahan, Pasan, Ratahan Timur dan Posumaen, kini mulai bisa terprediksi. Sejumlah sosok diyakini akan melenggang ke gedung putih.

Namun, bila menilik Daftar Calon Sementara (DCS) yang dirilis KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, figur potensial di dapil ini masih didominasi kader parpol besar yang semuanya sudah dikenal luas. Tinggal strategi yang menentukan nasib mereka pada Pileg 2024 mendatang.

Sebagaimana dapil lainnya, PDIP masih menjadi partai yang diunggulkan. Deretan figur populis diutus bertarung memperebutkan jatah kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara. Marty Ole ada di nomor urut 2. Ketua DPRD Minahasa Tenggara itu sudah dikenal luas warga Kabupaten Minahasa Tenggara.

Belakangan, dia rajin turun menyapa rakyat. Sebelumnya, pada Pileg 2019, dia maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dari dapil yang sama dengan perolehan suara terbanyak. Bila mampu dikonversikan pada Pileg 2024, Ole sangat berpeluang.

Peluang tak kalah besar dimiliki Samuel Montolalu. Ketua Fraksi PDIP itu kini menakhodai sejumlah organisasi yang memiliki massa militan. Dia bahkan sukses memimpin kepanitiaan berbagai kegiatan. Dengan bantuan mesin birokrasi dan partai yang sudah pasti akan turut menyokongnya, Montolalu bisa jadi salah satu representasi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sophia Antou juga menjadi unggulan di dapil ini. Berstatus sebagai petahana pada Pileg 2024, Antou bakal mendapat insentif suara dari warga yang puas dengan kepemimpinannya selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara. Bahkan, dukungan dari birokrat Pemkab Minahasa Tenggara akan turut memudahkan langkahnya menjadi wakil rakyat.

Petahana lainnya, Deniji Porayou, juga masih berpeluang besar kembali dipilih menjadi wakil rakyat di Dapil 1. Depo, sapaan akrabnya, dikenal vokal dan merakyat selama menjalankan tugas sebagai legislator. Dia dinilai sukses mengamankan sejumlah kepentingan

ingan konstituen selama bertugas di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Begitupula dengan Dolfy Theodorus Rohang. Sekretaris DPC PDIP yang perlu diperhitungkan untuk bertarung di Pileg 2024. Yang memantik perhatian pada line up PDIP adalah ketidakhadiran Ronald Kawuwung, Iwfone Adam dan Rosita Paputungan di DCS.

Amujajaran

nisi Golkar di Dapil 1 juga diisi figur populer. Nama Vanda Rantung bak bintang di line up partai beringin yang berstatus anggota DPRD Minahasa Tenggara. Dia punya semua modal untuk memenangi Pileg tahun depan. Rantung merupakan Ketua AMPI Kabupaten Minahasa Tenggara yang sudah pasti disokong para kader dan relawan.

Statusnya sebagai Ketua Komisi WKI Sion Lowu Dua wilayah Ratahan sangat berpotensi membuatnya meraih suara signifikan. Belum lagi ketokohnya yang masih memiliki massa militan di Dapil 1.

Figur Soni Tarumingi turut berpotensi kembali menjadi penghuni Gedung Putih. Sosok yang dikenal low profile itu punya pemilihan tradisional sebagai pendukung setianya di se-

jumlah titik di wilayah Kecamatan Ratahan Timur.

Selain dua nama di atas, Golkar punya peluang mengutus mantan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, Meidy Untu, ke Gedung Putih. Wakil Kecamatan Posumaen itu familiar di kalangan masyarakat sebagai sosok yang merakyat. Ketokohan Heski Naray turut jadi andalan Golkar.

Dari Demokrat, nama Fitria Asaha tentu saja jadi andalan. Masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, dia punya basis massa di wilayah Posumaen. Bahkan, nama Sekretaris Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara, Nolly Langingi, diyakini akan kembali berpeluang menjadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Politisi senior ini dikenal sebagai tokoh masyarakat yang aspiratif, sehingga diprediksi masih akan mendulang suara cukup besar di Pileg nanti. Nama Jemi Walukow menjadi kuda hitam dari Demokrat di Dapil 1. Ketokohan mantan Camat Posumaen ini bisa membawa insentif elektoral baginya.

Sedangkan dari Gerindra, sosok petahana Rasni Pontororing di baris depan diyakini akan bertambah seiring dengan berbagai capaian yang diraih selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara. Kuda hitam lain dari Gerindra adalah sosok anak muda Keny Solar. Keny merupakan putra dari salah satu pengusaha asal Ratahan. Dikenal vokal dan siap memperjuangkan aspirasi rakyat, Keny kans memikat hati rakyat untuk memilihnya ke DPRD Mitra. ●RDO



"Head to head pada Januari 2023, Ganjar unggul atas Prabowo dengan selisih 4,6 persen. Tapi, di Agustus Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 8,4 persen"

Ade Mulyana



PRABOWO-GANJAR MAKIN JAUHI ANIES

Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan dipastikan sudah tidak terkejar tokoh lainnya dalam bursa calon presiden jelang Pilpres 2024. Sepanjang tahun ini, Prabowo dan Ganjar saling salip tingkat elektabilitas berdasarkan laporan sejumlah Lembaga survei.

Berdasarkan survei terbaru dari LSI Denny JA, head to head antara Prabowo dengan Ganjar ada hal yang cukup menarik. Survei tersebut mencatat, jika kedua figur itu head to head di Pilpres 2024, Prabowo menang telak atas Ganjar. Menteri Pertahanan itu mendapatkan dukungan sebesar 51,5 persen, sedangkan Ganjar 43,1 persen.

"Terdapat selisih sebesar 8,4 persen," ujar peneliti LSI Denny JA, Ade Mulyana, Rabu, 30 Agustus 2023.

Tren elektabilitas pada Januari, Mei, Juni, Juli dan Agustus tahun ini menunjukkan, Prabowo pertama kalinya ada penurunan 2 persen, yakni dari 38,2 persen pada Juli menjadi 36,2 persen pada Agustus 2023. Akan tetapi, jika dibandingkan Januari yang sebesar 25,4 persen, elektabilitas Prabowo ada kenaikan sebesar 10,8 persen.

Elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan yang sangat signifikan sejak Januari hingga Agustus 2023. Ade mengungkapkan tren elektabilitas data simulasi head to head Prabowo dan Ganjar.

"Hasilnya, Prabowo kian melekat terhitung sejak Januari 2023 yang mencapai 38,5 persen, Mei 44,5 persen, Juni 50,4 persen, Juli 52 persen, hingga Agustus 51,5 persen," ung-

kap Ade.

Sementara itu, elektabilitas Ganjar pada Januari 2023 mencapai 43,1 persen, Mei 38,1 persen, Juni 43,2 persen, Juli 41,6 persen, dan Agustus 43,1 persen. Dia juga mengungkap, selisih elektoral dari Prabowo dan Ganjar cukup jauh. Prabowo Subianto unggul Ganjar Pranowo.

"Head to Head Prabowo versus Ganjar pada Januari 2023, Ganjar unggul atas Prabowo dengan selisih 4,6 persen. Tapi, di Agustus Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 8,4 persen," papar Ade.

Ade menyampaikan, berdasarkan simulasi tiga nama capres yang mengemuka saat ini, Prabowo unggul dengan perolehan elektabilitas mencapai sebesar 36,2 persen. Elektabilitas Ganjar di angka 35,8 persen dan Anies di angka 19,7 persen.

Hasil tidak jauh berbeda terjadi sejak Januari 2023. Tercatat, elektabilitas Prabowo konsisten mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni 25,4 persen, lalu Mei 33,9 persen, Juli 38,2 persen dan Agustus capai 36,2 persen.

Sementara Ganjar Pranowo, Januari 37,8 persen, Mei 31,9 persen, Juni 32,7 persen, Juli 35,3 persen dan Agustus 35,8 persen. Sedangkan, Anies Baswedan pada Januari 22,1 persen, Mei 20,8 persen, Juni 22,1 persen, Juli 18,4 persen dan Agustus 19,7 persen.

LSI Denny JA juga menemukan bahwa pemilih partai pro-Prabowo terbilang cukup solid dengan menyumbangkan dukungan sebesar 43,6 persen di basis pemilih generasi milenial. Jum-

lah dukungan tersebut mengalahkan partai pro-Ganjar yang mendapat angka 24,5 persen dan partai pro-Anies yang hanya mendapat 15,8 persen. Para milenial terekam banyak menjatuhkan pilihan pada partai yang mendukung capres Prabowo Subianto.

"Di generasi milenial partai pro-Prabowo yang unggul. Di generasi ini partai pro-Prabowo mendapatkan 43,6 persen. Partai pro-Ganjar mendapatkan 24,5 persen. Partai pro-Anies mendapatkan 15,8 persen," kata Direktur Eksekutif LSI, Denny JA.

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan sebanyak 57 persen partai politik yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi telah melabuhkan dukungannya kepada Prabowo. Sedangkan, sebanyak 28 persen dukungan kepada Ganjar.

"Dilihat dari komposisi partai, empat dari tujuh partai pendukung pemerintahan Jokowi (57 persen) berlabuh ke Prabowo. Sebanyak dua dari tujuh partai pendukung Jokowi (28 persen) mendukung Ganjar," ujar Denny JA.

Bahkan, parpol pendukung Prabowo menjadi penyumbang suara terbanyak terhadap Menteri Pertahanan tersebut. Per-

olehan suara partai pendukung Prabowo masih menjadi tertinggi dalam hasil survei tersebut.

"Perolehan suara partai pro-Prabowo masih yang tertinggi sebesar 39,0 persen. Partai Gerindra penyumbang terbesar dengan 15,7 persen. Diikuti oleh Golkar dengan 12,7 persen. Kemudian PKB sebesar 6,6 persen, dan PAN sebesar 4 persen," ucap Denny.

Survei tersebut juga mencatatkan partai koalisi Prabowo yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN menyumbang elektabilitas yang signifikan. Terbukti Prabowo bertengger di posisi puncak elektabilitas survei dengan torehan angka sebesar 36,2 persen.

Sedangkan Ganjar Pranowo berada di posisi kedua dengan 35,8 persen dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 19,7 persen. Soliditas partai pro-Prabowo diperkuat dengan tingginya elektabilitas kala menghadapi Ganjar secara head to head.

Sementara, berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indoensia (LSI), Prabowo menjadi sosok capres yang paling banyak dipilih oleh masyarakat.

"Secara spontan, Prabowo paling banyak dipilih 24,2 persen. Baru kemudian Ganjar 22,6 persen, Anies 16,4 persen, nama lain jauh lebih rendah, sementara 30,7 persen belum memberikan jawaban," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, Rabu, 30 Agustus 2023.

Sementara itu, ketika dilakukan simulasi 35 nama semi terbuka terhadap sosok calon presiden hasil berbeda. Masyarakat lebih banyak menyebut nama Ganjar Pranowo ketimbang Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan.

"Simulasi 35 nama semi terbuka dan boleh menyebutkan nama lainnya, Ganjar paling tinggi 31,5 persen, kemudian Prabowo 31,2 persen, Anies 19,7 persen, nama lain jauh lebih rendah, belum menjawab 7 persen," ucap Djayadi.

Sedangkan pada saat dilakukan simulasi tertutup 10 nama calon presiden, Ganjar Pranowo tetap mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Simulasi 10 nama, Ganjar paling tinggi 34,4 persen, kemudian Prabowo 32 persen, Anies 19,7 persen, nama lain lebih rendah, belum menjawab 5,8 persen," tutur Djayadi.

Selanjutnya, ketika dilakukan simulasi tertutup dua nama calon presiden antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu unggul jauh dari Ganjar Pranowo. RDO

